

Pembuatan Kebijakan Keamanan Nasional dan Gender

Peter Albrecht dan Karen Barnes



Pembuatan Kebijakan Keamanan Nasional dan Gender

Peter Albrecht dan Karen Barnes



Geneva Centre for the
Democratic Control of
Armed Forces (DCAF)

Tentang Penulis

Peter Albrecht dan Karen Barnes dari International Alert.

International Alert (Kewaspadaan Internasional) adalah sebuah LSM yang berpusat di London yang telah bekerja selama lebih dari 20 tahun untuk meletakkan dasar-dasar bagi perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan di negara-negara yang mengalami konflik yang kejam. Pendekatan multi-aspek International Alert berfokus pada dan antar berbagai kawasan, yang bertujuan membentuk kebijakan dan praktik yang mempengaruhi pembangunan perdamaian dan membantu membangun keterampilan dan kemampuan melalui pelatihan.

Program regional Kewaspadaan Internasional dilaksanakan di kawasan Danau Besar Afrika, Afrika Barat, Kaukasus Selatan, Nepal, Sri Lanka, Filipina dan Kolombia. Proyek-proyek tematik Kewaspadaan Internasional berjalan di tingkat lokal, regional dan internasional, yang berfokus pada isu-isu lintas-sektoral yang sangat penting dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan. Proyek ini meliputi proyek bisnis dan ekonomi, gender, tata pemerintahan, bantuan, keamanan dan keadilan.

Penyunting

Megan Bastick dan Kristin Valasek, DCAF.

Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak berikut atas komentar berharga mereka mengenai rancangan *tool* (alat) ini: Sanam Naraghi Anderlini, Megan Bastick, Willem F. van Eekelen, Ingrid Kraiser, UN-INSTRRAW, Kristin Valasek, Johanna Valenius, Charlotte Watson dan Mark White. Selain itu, kami juga menyampaikan terima kasih kepada Benjamin Buckland, Anthony Drummond, dan Mugiho Takeshita atas bantuan penyuntingan mereka, dan Anja Ebnöther atas bimbingannya dalam proyek ini.

Toolkit Gender dan RSK

Tool (alat) mengenai Pembuatan Kebijakan Keamanan Nasional dan Gender ini merupakan bagian dari *Toolkit Gender dan RSK*. Dirancang untuk memberikan pengantar praktis isu gender bagi para praktisi dan pembuat kebijakan reformasi sektor keamanan, *Toolkit* ini terdiri dari 12 *Tool* (Alat) berikut dan Catatan Praktiknya:

- | | |
|--|--|
| 1. Reformasi Sektor Keamanan dan Gender | 9. Pengawasan Masyarakat Sipil terhadap Sektor Keamanan dan Gender |
| 2. Reformasi Kepolisian dan Gender | 10. Perusahaan-perusahaan Militer dan Keamanan Swasta dan Gender |
| 3. Reformasi Pertahanan dan Gender | 11. Penilaian, Pemantauan dan Evaluasi RSK dan Gender |
| 4. Reformasi Peradilan dan Gender | 12. Pelatihan Gender untuk Personil Sektor Keamanan |
| 5. Reformasi Hukum Pidana dan Gender | Lampiran Undang-undang dan Instrumen Internasional dan Regional |
| 6. Manajemen Perbatasan dan Gender | |
| 7. Pengawasan Parlemen terhadap Sektor Keamanan dan Gender | |
| 8. Pembuatan Kebijakan Keamanan Negara dan Gender | |

DCAF, OSCE/ODIHR dan UN-INSTRRAW mengucapkan terima kasih atas bantuan Kementerian Luar Negeri Norwegia dalam pembuatan *Toolkit* ini. We also thank OSCE/ODIHR for supporting the production of this Tool.

DCAF

Pusat Kendali Demokratis atas Angkatan Bersenjata Jenewa (DCAF) mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi sektor keamanan. Pusat ini melakukan penelitian mengenai praktik yang baik, mendorong pengembangan norma-norma yang sesuai di tingkat nasional dan internasional, membuat rekomendasi kebijakan dan mengadakan program konsultasi dan bantuan di negara yang membutuhkan. Para mitra DCAF meliputi pemerintah, parlemen, masyarakat sipil, organisasi internasional, dan para aktor sektor keamanan seperti polisi, lembaga peradilan, badan intelijen, badan keamanan perbatasan, dan militer.

OSCE/ODIHR

Kantor Lembaga Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (ODIHR) adalah lembaga utama untuk dimensi manusiawi keamanan OSCE: suatu konsep umum yang mencakup perlindungan HAM; pengembangan masyarakat yang demokratis, dengan penekanan pada pemilihan umum, pembangunan lembaga dan tata kelola pemerintahan; penguatan pemerintahan berdasarkan hukum; dan mempromosikan rasa saling hormat yang tulus dan saling pengertian antar individu dan juga negara. ODIHR ikut berperan dalam penyusunan *Toolkit* ini.

UN-INSTRRAW

Institut Penelitian dan Latihan Kemajuan Wanita Internasional PBB (UN-INSTRRAW) adalah satu-satunya lembaga PBB yang diberi tugas untuk menyusun program penelitian yang berperan bagi pemberdayaan wanita dan pencapaian kesetaraan gender di seluruh dunia. Melalui pembangunan aliansi dengan Negara-negara Anggota PBB, organisasi-organisasi internasional, akademisi, masyarakat sipil dan para aktor lainnya, UN-INSTRRAW: Melakukan penelitian berorientasi aksi dari perspektif gender yang memberikan dampak nyata terhadap berbagai kebijakan, program dan proyek; Menciptakan sinergi untuk manajemen pengetahuan dan pertukaran informasi; Memperkuat kemampuan para *stakeholder* (pihak yang berkepentingan) utama dalam memadukan perspektif gender ke dalam berbagai kebijakan, program dan proyek.

Gambar sampul © Keystone, AP, Alvaro Barrientos, 2008.

© DCAF, OSCE/ODIHR, UN-INSTRRAW, 2008.

Hak cipta dilindungi undang-undang.

ISBN 978-92-9222-074-7

Dokumen ini diterbitkan secara asli oleh DCAF, OSCE/ODIHR dan UN-INSTRRAW pada tahun 2008 sebagai bagian dari Toolkit Gender dan RSK. Versi bahasa Indonesia ini diterjemahkan dari bahasa Inggris oleh Catherine Muir dan diterbitkan oleh IDSPS atas nama DCAF.

Kutip sebagai: Peter Albrecht dan Karen Barnes. "National Security Policy-Making and Gender." *Gender and Security Sector Reform Toolkit*. ("Pembuatan Kebijakan Keamanan Nasional dan Gender." *Toolkit Gender dan Reformasi sektor keamanan*.) Eds. (Penyunting) Megan Bastick dan Kristin Valasek. Jenewa: DCAF, OSCE/ODIHR, UN-INSTRRAW, 2008.

Dicetak oleh SRO-Kundig.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| Daftar Akronim | iii |
| 1. Pendahuluan | 1 |
| 2. Apa itu kebijakan keamanan nasional? | 1 |
| 2.1 Kebijakan keamanan nasional | 2 |
| 2.2 Kebijakan keamanan spesifik sektor | 4 |
| 3. Mengapa gender penting dalam pembuatan kebijakan keamanan? | 5 |
| 3.1 Pemilikan lokal melalui proses pembuatan kebijakan partisipatif | 5 |
| 3.2 Kebijakan keamanan komprehensif yang mempertimbangkan kebutuhan keamanan yang beragam | 7 |
| 3.3 Non-diskriminasi dalam kebijakan keamanan dan lembaga sektor keamanan | 8 |
| 4. Bagaimana memadukan gender ke dalam kebijakan keamanan? | 8 |
| 4.1 Pemerintah pusat | 8 |
| 4.2 Parlemen | 11 |
| 4.3 Pemerintah daerah | 13 |
| 4.4 Organisasi masyarakat sipil | 14 |
| 4.5 Pelatihan gender | 16 |
| 4.6 Penilaian, pemantauan, dan evaluasi | 17 |
| 5. Memadukan gender dalam kebijakan keamanan nasional dalam konteks khusus | 20 |
| 5.1 Negara-negara pasca-konflik | 20 |
| 5.2 Negara-negara dalam masa transisi dan negara-negara berkembang | 22 |
| 5.3 Negara-negara maju | 23 |
| 6. Rekomendasi pokok | 25 |
| 7. Sumber daya tambahan | 25 |

SINGKATAN DAN AKRONIM

| | |
|--------------------|---|
| ANC | <i>African National Congress</i> (Kongres Nasional Afrika) |
| CEDAW | <i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women</i> (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) |
| CFSP | <i>Common Foreign and Security Policy</i> (Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama) |
| CIA | <i>Central Intelligence Agency</i> (Badan Intelijen Pusat) |
| CIDA | <i>Canadian International Development Agency</i> (Badan Pembangunan Internasional Kanada) |
| CPF | <i>Community Police Forum</i> (Forum Polisi Masyarakat) |
| DCAF | <i>Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces</i> (Pusat Kendali Demokratis atas Angkatan Bersenjata Jenewa) |
| Dephan | <i>Department of Defence</i> (Departemen Pertahanan) |
| DISEC | <i>District Security Committees</i> (Komite Keamanan Distrik) |
| ESDP | <i>European Security and Defence Policy</i> (Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Eropa) |
| FFRP | <i>Forum of Rwanda Women Parliamentarians</i> (Forum Anggota Parlemen Wanita Rwanda) |
| GBV | <i>Gender-Based Violence</i> (Kekerasan Berbasis Gender) |
| GSE | <i>Gender and Socio-economic Analysis</i> (Gender dan Analisis Sosio-ekonomi) |
| LCC | <i>Local Citizen Councils</i> (Dewan Masyarakat Lokal) |
| LSM | <i>Non-Governmental Organisation</i> Lembaga Swadaya Masyarakat) |
| M&E | <i>Monitoring and Evaluation</i> (Pemantauan dan Evaluasi) |
| MoD | <i>Ministry of Defence</i> (Kementerian Pertahanan) |
| NATO | <i>North Atlantic Treaty Organization</i> (Organisasi Perjanjian Atlantik Utara) |
| NSC | <i>National Security Council</i> (Dewan Keamanan Nasional) |
| NSCCG | <i>National Security Council Co-ordinating Group</i> (Kelompok Koordinasi Dewan Keamanan Nasional) |
| NSP | <i>National Security Policy</i> (Kebijakan Keamanan Nasional) |
| NSS | <i>National Security Strategy</i> (Strategi Keamanan Nasional) |
| OMS | <i>Civil Society Organisation</i> (Organisasi Masyarakat Sipil) |
| ONS | <i>Office of National Security</i> (Kantor Keamanan Nasional) |
| PRSP | <i>Poverty Reduction Strategy Paper</i> (Buku Strategi Pengurangan Kemiskinan) |
| PROSEC | <i>Provincial Security Committees</i> (Komite Keamanan Provinsi) |
| SAPS | <i>South African Police Service</i> (Kepolisian Afrika Selatan) |
| SANDF | <i>South African National Defence Force</i> (Kekuatan Pertahanan Nasional Afrika Selatan) |
| UNIFEM | <i>United Nations Development Fund for Women</i> (Dana Pembangunan PBB untuk Wanita) |
| UN SCR 1325 | <i>United Nations Security Council Resolution 1325 on women, peace and security</i> (Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 tentang perempuan, perdamaian dan keamanan) |

Pembuatan Kebijakan Keamanan Nasional dan Gender

1 Pendahuluan

Sebagai bagian dari Toolkit Gender dan Reformasi sektor keamanan, tool (alat) ini memberikan pengantar manfaat dan peluang memadukan isu gender ke dalam pembuatan kebijakan keamanan tingkat nasional.¹ Sebagai dokumen strategis, kebijakan keamanan sangat penting dalam menentukan respons yang terkoordinasi terhadap ancaman keamanan dan dapat menjadi landasan bagi proses reformasi sektor keamanan (RSK). Ini meliputi kebijakan keamanan nasional (NSP, national security policies) dan juga kebijakan spesifik sektor, seperti buku putih pertahanan. Menjamin pemaduan isu gender ke dalam kebijakan keamanan dapat meningkatkan partisipasi dan kepemilikan lokal, serta menciptakan kebijakan dan lembaga yang lebih mungkin memberikan keamanan dan keadilan secara efektif dan berkelanjutan kepada pria, wanita, anak perempuan dan anak lelaki secara adil.

Tool (alat) ini dirancang sebagai sumber daya bagi staf yang bertanggung jawab memprakarsai proses pembuatan kebijakan keamanan di lembaga eksekutif pemerintahan, termasuk staf yang bertanggung jawab merancang, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan keamanan. Selain itu, tool (alat) ini mungkin berguna bagi berbagai aktor lainnya yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan keamanan, termasuk para anggota parlemen dan staf parlemen, staf kementerian, organisasi masyarakat sipil, pemerintah kota, organisasi internasional dan regional, dan negara-negara donor yang mendukung penyusunan kebijakan keamanan.

Secara khusus, tool (alat) ini memberikan:

- Pengantar singkat kebijakan keamanan, termasuk NSP dan kebijakan spesifik sektor
- Pembahasan mengenai pentingnya dan manfaat penerapan perspektif gender dalam pembuatan kebijakan keamanan
- Tindakan praktis untuk memadukan dimensi gender ke dalam pembuatan kebijakan keamanan
- Pengantar penyusunan kebijakan keamanan di negara-negara pasca-konflik, negara-negara yang sedang dalam masa transisi, negara-negara berkembang dan negara-negara maju
- Rekomendasi pokok
- Sumber daya tambahan

Mengenai masalah penting pelaksanaan kebijakan oleh aktor-aktor tertentu yang termasuk dalam sektor keamanan silakan lihat tool (alat) lainnya dalam Toolkit

Gender dan RSK. Fokus tool (alat) ini adalah pembuatan kebijakan dan bagaimana cara terbaik memasukkan gender ke dalam proses tersebut. Harus diingat bahwa kebijakan itu sendiri kecil manfaatnya. Kebijakan akan mempengaruhi bagaimana keamanan dan keadilan diberikan di negara tertentu hanya bila kebijakan tersebut dilaksanakan.

2 Apa itu kebijakan keamanan nasional?

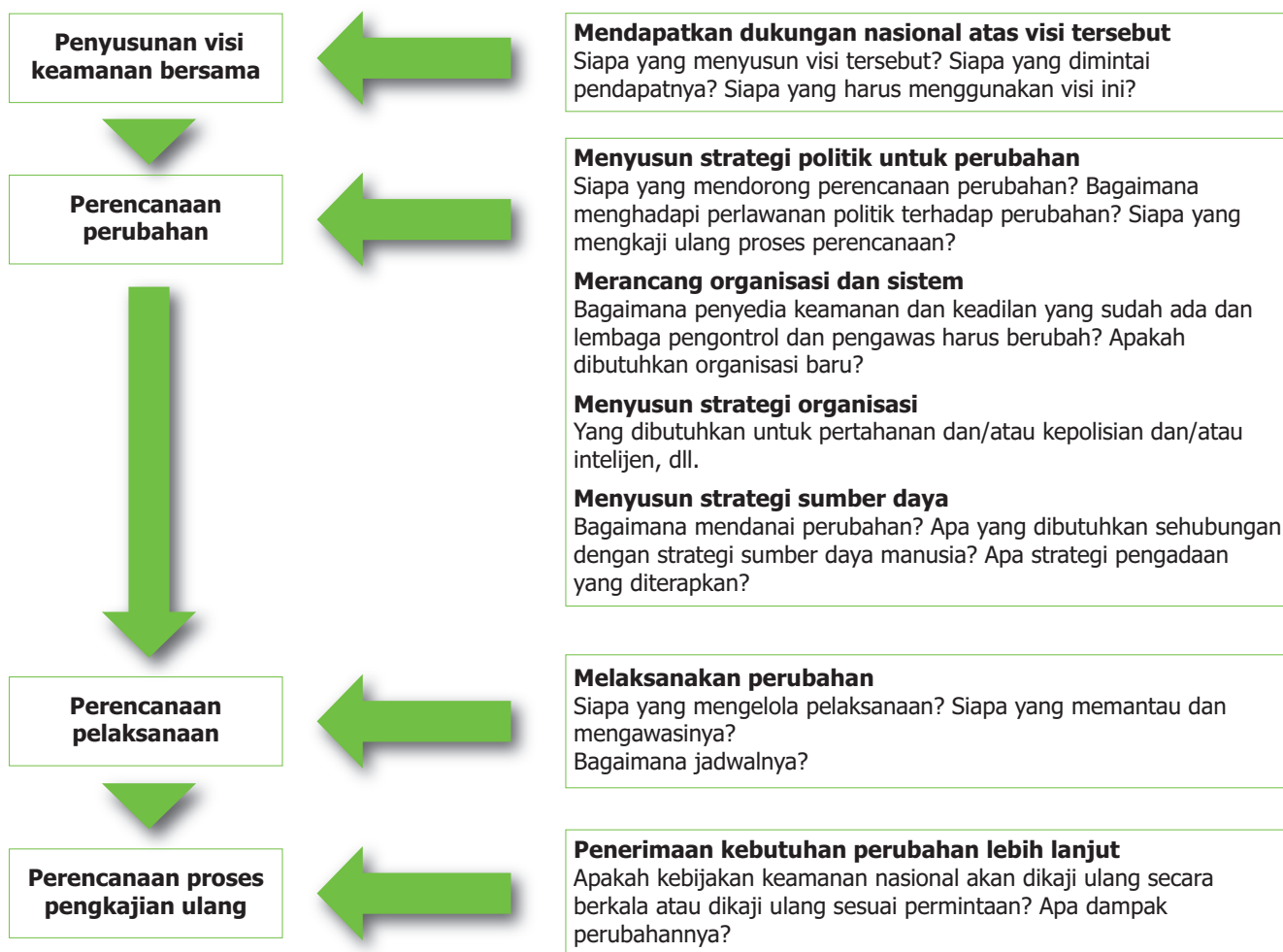
Suatu kebijakan keamanan tingkat nasional menunjukkan persepsi pemerintah mengenai ancaman terhadap keamanan negara dan rakyatnya dan respons pemerintah terhadap ancaman ini. Suatu kebijakan berbeda dengan peraturan atau undang-undang. Misalnya, suatu undang-undang dapat memaksa atau melarang perilaku tertentu, sedangkan suatu kebijakan hanya memandu tindakan yang paling mungkin untuk mencapai hasil yang diharapkan. Dengan demikian, suatu kebijakan merupakan rencana aksi yang telah dipertimbangkan untuk memandu keputusan di pihak lembaga eksekutif. Penyusunan kebijakan keamanan melibatkan penentuan pendekatan terhadap isu-isu keamanan, pemeringkatan ancaman keamanan dan pembuatan keputusan penting tentang sektor keamanan. Kebijakan keamanan pada tingkat nasional, termasuk kebijakan keamanan nasional dan kebijakan spesifik lembaga, mempertimbangkan ancaman internal maupun eksternal terhadap keamanan dan disusun sesuai dengan undang-undang internasional dan regional yang telah diratifikasi negara tersebut.²

Banyak aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan keamanan:

Lembaga eksekutif pemerintahan, termasuk kementerian pemerintah, memprakarsai proses penentuan kebijakan keamanan baru atau perubahan kebijakan keamanan yang sudah ada. Lembaga eksekutif mengangkat para anggota badan-badan koordinasi keamanan dan komite perancang kebijakan.

Parlemen dapat menyetujui, mengusulkan perubahan atau menolak suatu kebijakan keamanan. Di banyak negara demokratis, parlemen juga berwenang menentukan keputusan akhir atas anggaran dan memantau serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan keamanan.

Pemerintah daerah mencakup pemerintah provinsi



Gambar 1: Pertanyaan yang harus diajukan saat menyusun kebijakan keamanan³

atau kabupaten dan kota. Bekerja sama dengan lembaga-lembaga sektor keamanan daerah, mereka dapat menjadi pelaksana utama kebijakan keamanan tingkat nasional.

Aktor keamanan bukan negara, seperti kepala suku tertinggi, dewan desa dan angkatan bersenjata non-reguler di banyak negara pasca-konflik dan beberapa negara berkembang adalah penyedia utama keamanan dan keadilan. Karena itu, para aktor keamanan bukan negara harus dimasukkan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan keamanan.

Organisasi masyarakat sipil (OMS) dapat berpartisipasi dalam penilaian, perancangan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan keamanan.

Gambar 1 menerangkan proses yang harus diikuti dan pertanyaan-pertanyaan penting yang harus diajukan dalam membuat kebijakan keamanan. Proses ini dapat disesuaikan untuk membantu penyusunan kebijakan keamanan nasional (*NSP, national security policy*) dan juga kebijakan keamanan spesifik sektor.

2.1 Kebijakan keamanan nasional

DCAF mengemukakan definisi umum NSP sebagai 'suatu kerangka untuk menerangkan bagaimana suatu negara menyediakan keamanan bagi pemerintah dan rakyatnya'.⁴ Dokumen kebijakan ini dapat juga dikatakan sebagai rencana, visi, strategi, konsep atau doktrin. Suatu NSP sering digambarkan sebagai dokumen terpadu yang menggambarkan bagaimana sektor keamanan akan ditata untuk menghadapi ancaman keamanan eksternal maupun internal.⁵ Karena NSP berusaha mencakup keamanan nasional secara keseluruhan, menurut jenjangnya NSP cenderung lebih tinggi daripada kebijakan spesifik sektor, badan atau isu seperti kebijakan yang mempertimbangkan doktrin militer atau kepolisian. Kotak 1 menggambarkan proses penyusunan NSP.

NSP juga dibedakan dengan kebijakan keamanan lainnya berdasarkan ruang lingkup persoalan yang ditanganinya. NSP cenderung berfokus pada ancaman keamanan eksternal yang memerlukan respons nasional. Misalnya, hal ini masih terjadi di Amerika Serikat (AS). NSP Amerika Serikat menangani masalah yang berkisar dari kesiapan kekuatan militer,

Kotak 1 Penyusunan kebijakan keamanan nasional⁶

1. Lakukan **analisis lingkungan strategis** dan identifikasi 'visi nasional' untuk negara bersangkutan dan rakyatnya melalui konsultasi berbasis luas. Proses ini harus mencakup konsultasi dengan OMS untuk membahas masalah keamanan perseptual dan aktual – misalnya melalui proposal tertulis dan partisipasi langsung dalam pertemuan publik.
2. **Analisis dan susun peringkat ancaman dan peluang saat ini dan masa depan** terhadap pencapaian tujuan yang dinyatakan dalam 'visi nasional'.
3. **Tentukan dan susun peringkat kemampuan nasional**, baik di dalam dan di luar sektor keamanan/peradilan, yang dapat menghadapi ancaman keamanan dan memberikan layanan keamanan penting kepada masyarakat. Ini meliputi landasan keuangan untuk melaksanakan NSP, dan prosedur manajemen keuangan umum negara tertentu.
4. **Lakukan analisis kesenjangan (gap analysis)** untuk menilai kemampuan saat ini lembaga-lembaga keamanan/peradilan nasional untuk menghadapi ancaman dan memberikan layanan penting, dibandingkan dengan kemampuan yang diperlukan. Bila layak, analisis kesenjangan harus didasarkan pada sumber-sumber di dalam maupun di luar lembaga negara.
5. Tentukan **NSP yang telah diperingkat dan dianggarkan** untuk memberikan keamanan dan keadilan yang lebih baik dalam mendukung tujuan pembangunan nasional yang lebih luas.

Kotak 2 Isi Strategi Keamanan Nasional Lituania⁹

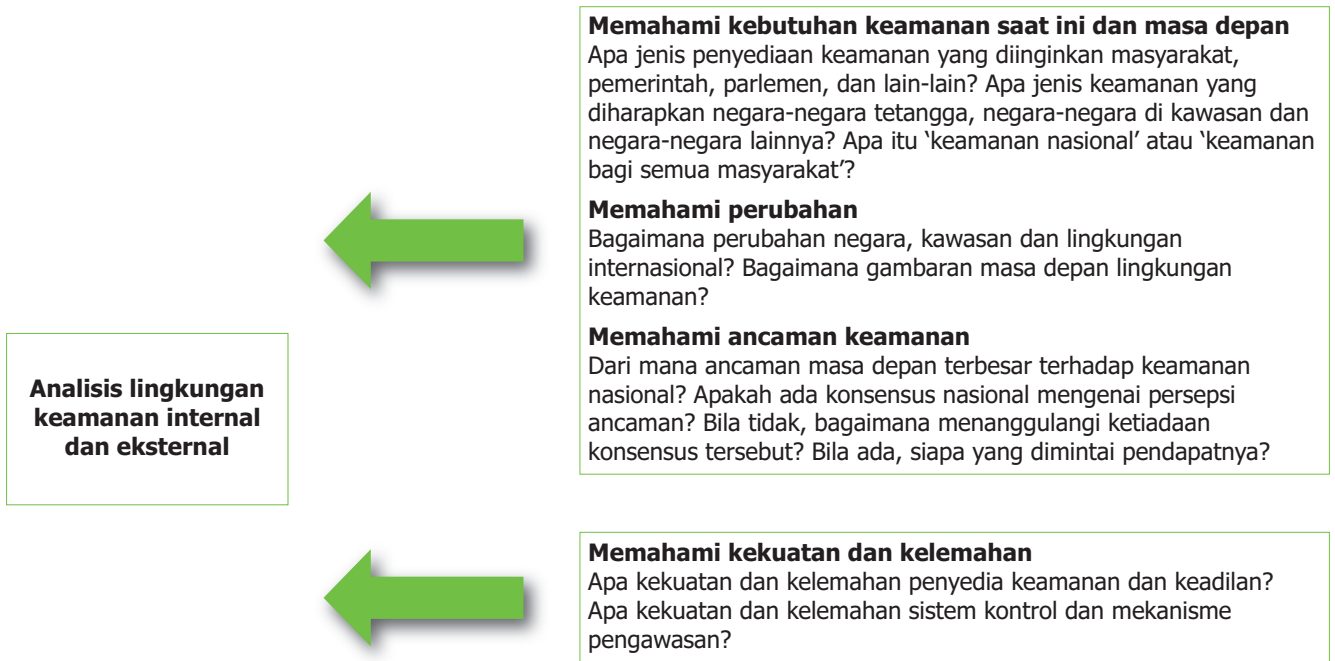
Strategi Keamanan Nasional Lituania merupakan contoh jelas isu umum yang dapat ditangani NSP. Strategi ini memberikan suatu 'visi nasional' bagi pembangunan negara tersebut, kepentingan nasionalnya dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Yang penting, strategi ini mencakup bidang politik, diplomatik, pertahanan, ekonomi dan bidang-bidang kebijakan negara lainnya. 'Lituania memandang keamanannya memelihara kedaulatan dan integritas wilayahnya, keamanan dan ketertiban dalam negeri, landasan demokrasi, keamanan ekonomi dari semua badan hukum dan rakyat serta perlindungan lingkungan alamnya.' Bagian-bagian dari Strategi Keamanan Nasional tersebut adalah:

- **Asumsi dasar kebijakan keamanan:** bagian ini menggambarkan sistem keamanan internasional saat ini sebagai sistem yang menguntungkan dan menganggap sebagian besar tantangan lama yang sudah ada dan tantangan baru bersifat lintas negara. Tidak ada ancaman militer langsung terhadap keamanan nasional Lituania.
- **Kepentingan keamanan Republik Lituania:** ini dibagi menjadi kepentingan vital maupun primer. Kepentingan vital meliputi kedaulatan negara, integritas wilayah dan ketertiban demokratis konstitusional; penghormatan dan perlindungan HAM dan hak-hak sipil serta kebebasan; dan kedamaian serta kemakmuran negara. Kepentingan primer meliputi stabilitas global dan regional, kebebasan dan demokrasi di Eropa Tengah dan Timur serta Negara-negara Baltik; menjamin pasokan energi alternatif dan pasokan sumber daya yang mempunyai nilai strategis; dan kawasan yang bebas dari bahaya lingkungan.
- **Tantangan, bahaya dan ancaman:** yang termasuk dalam bagian ini adalah terorisme, kejahatan terorganisir, penyebaran senjata, perdagangan narkoba, migrasi ilegal dan epidemi, serta ketergantungan Lituania pada pasokan sumber daya dan energi hanya dari satu negara. Keadaan ekonomi, termasuk kesejahteraan rakyat dan penghindaran pembangunan sosial dan ekonomi yang tidak merata serta kemandirian negara, juga dianggap sebagai ancaman potensial terhadap keamanan nasional.
- **Kebijakan keamanan Republik Lituania:** yang termasuk dalam bagian ini adalah sasaran dan tujuan utama keamanan nasional; konsep strategis dan panduan pelaksanaan; keadaan yang membenarkan penggunaan kekuatan militer; dan pentingnya stabilitas dalam negeri dan kemakmuran.
- **Tindakan primer dan cara pelaksanaan strategi:** yang termasuk dalam bagian ini adalah integrasi ke dalam NATO dan EU (European Union - Uni Eropa), penguatan kerja sama bilateral dan multilateral internasional, partisipasi dalam operasi perdamaian dan penanganan krisis internasional, dll. Penekanan khusus diberikan pada pentingnya penguatan keamanan ekonomi dan sosial dalam negeri, pengendalian dan pencegahan kejahatan, perlindungan lingkungan dan kebudayaan, dan penguatan intelijen, kontra-intelijen dan perlindungan informasi rahasia.

strategi nuklir dan terorisme sampai senjata kimia dan biologi.⁷ Namun demikian, NSP semakin meliputi evaluasi yang komprehensif mengenai lingkungan keamanan dalam negeri maupun internasional (lihat Gambar 2). Misalnya, Konsep Keamanan Nasional 1998 Bulgaria didasarkan pada premis bahwa tidak ada ancaman militer langsung terhadap keamanan nasional. Sebaliknya, konsep ini berfokus pada masalah seperti kejahatan terorganisir (lintas negara dan lintas perbatasan), penyelundupan (narkoba, senjata dan manusia), perdagangan ilegal (terutama perdagangan senjata yang melanggar embargo PBB), terorisme dan kerusakan lingkungan.⁸

Model lainnya adalah NSP Afghanistan dan Azerbaijan, yang terbagi menjadi masalah keamanan eksternal dan internal. Dalam kasus Azerbaijan, masalah

eksternalnya meliputi integritas wilayah, integrasi di dalam struktur Eropa dan Euro-Atlantik, penguatan kemampuan pertahanan, dan lain-lain. Secara internal, kebijakan tersebut berfokus pada masalah seperti penguatan demokrasi, perlindungan toleransi nasional dan agama serta keamanan informasi. Di Sierra Leone, sebuah negara pasca-konflik, suatu NSP telah diserukan sebagai tindak lanjut atas proses pembuatan Kajian Ulang Sektor Keamanan yang berlangsung selama dua tahun. Kajian Ulang Sektor Keamanan memberikan beberapa rekomendasi, termasuk perlunya koordinasi yang lebih baik lintas sektor keamanan. Yang penting, kajian ulang ini lebih menyoroti bahaya ketidakstabilan dalam negeri ketimbang ancaman dari luar sebagai sumber potensial konflik baru.



Gambar 2: Identifikasi kebutuhan keamanan eksternal dan internal¹⁰

| Kotak 3 | Bosnia-Herzegovina dan Lituania: isi buku putih |
|---|---|
| <p>Buku Putih Pertahanan Bosnia-Herzegovina¹¹ memberikan penekanan khusus pada pembenahan pertahanan dan mengidentifikasi ancaman utama terhadap lingkungan keamanan (global, regional dan internal) Bosnia-Herzegovina. Selanjutnya, buku putih ini berfokus pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kebijakan pertahanan Bosnia-Herzegovina, yang meliputi prinsip strategis, integrasi ke dalam struktur keamanan Euro-Atlantik, Kemitraan untuk Perdamaian/standardisasi dan interoperability NATO serta peran dalam kerja sama regional di Eropa Tenggara. ■ Sistem pertahanan Bosnia-Herzegovina, yang meliputi kontrol demokratis atas angkatan bersenjata, komando sipil, pengawasan parlemen, transparansi dalam perencanaan dan penyusunan anggaran pertahanan, rantai komando operasi dan administrasi serta kekuatan angkatan bersenjata. ■ Sumber daya manusia dan pembangunan kemampuan, yang meliputi pelatihan perorangan dan pelatihan bersama, pengembangan profesional, penggunaan angkatan bersenjata, operasi dukungan perdamaian, bantuan dan dukungan bagi operasi pemerintahan sipil, korps perwira, prajurit, tentara cadangan dan sistem manajemen personel. <p>Kebijakan Pertahanan (Buku Putih)¹² Lituania menggambarkan perubahan seluruh lingkungan keamanan negara tersebut dan peran baru serta misi baru angkatan bersenjata. Selanjutnya, kebijakan ini berfokus pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Arah utama kebijakan pertahanan Lituania, yang meliputi penguatan keamanan Euro-Atlantik, proyeksi stabilitas, dan kerja sama pertahanan internasional, multilateral dan bilateral. ■ Pembenahan pertahanan, yang meliputi perubahan dari prinsip pertahanan teritorial menjadi prinsip pertahanan kolektif, tugas dan persyaratan baru angkatan bersenjata Lituania, dan pengkajian ulang struktur angkatan bersenjata. ■ Manajemen dan pelatihan personel. | |

2.2 Kebijakan keamanan spesifik sektor

Kebijakan keamanan spesifik sektor seperti buku putih pertahanan atau strategi keamanan dalam negeri berbeda dengan NSP karena menangani masalah keamanan nasional yang berkaitan dengan badan atau masalah tertentu. Biasanya, suatu kebijakan spesifik sektor memberikan panduan yang lebih mendasar tentang peran, struktur organisasi dan tanggung jawab suatu badan, dan tentang bagaimana badan tersebut harus menangani kebutuhan keaman-

an tertentu. Walaupun demikian, kebijakan spesifik sektor harus dibuat dalam konteks kebijakan nasional secara keseluruhan, sehingga menyelaraskan dan memadukan berbagai kebijakan dan badan pemerintah yang menangani masalah yang berkaitan dengan keamanan. Karena itu, sebagaimana NSP, kebijakan spesifik sektor merupakan landasan penting untuk melakukan usaha RSK yang sistematis dan terkoordinasi.

Suatu kebijakan keamanan dapat digambarkan sebagai suatu 'buku putih', yang pada dasarnya merupakan nama tidak resmi untuk buku parlemen

yang menyatakan kebijakan pemerintah (lihat Kotak 3). Buku putih ini adalah dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah yang menguraikan kebijakan dan/atau rencana aksi di suatu bidang tertentu. Walaupun tidak mengikat, buku putih kadang-kadang dapat dianggap sebagai bagian dari proses konsultasi terbuka. Namun demikian, buku putih cenderung menunjukkan keinginan jelas di pihak pemerintah untuk menyetujui undang-undang baru. 'Buku hijau' biasanya lebih terbuka dan mungkin hanya mengajukan suatu strategi atau dirumuskan sebagai suatu buku pembahasan atau konsultasi.

3 Mengapa gender penting dalam pembuatan kebijakan keamanan?

Gender merujuk pada peran dan hubungan, ciri kepribadian, sikap, perilaku dan nilai-nilai tertentu yang dihubungkan masyarakat dengan pria dan wanita. Karena itu, 'gender' merujuk pada perbedaan yang dipelajari antara pria dan wanita, sedangkan 'jenis kelamin' merujuk pada perbedaan biologis antara pria dan wanita. Peran gender sangat bervariasi di dalam dan antarkebudayaan dan dapat berubah sepanjang waktu. Gender tidak hanya merujuk pada wanita atau pria tapi juga merujuk pada hubungan di antara mereka.

Pengarusutamaan gender adalah proses menilai implikasi terhadap wanita dan pria dari suatu tindakan yang terencana, yang meliputi undang-undang, kebijakan atau program di semua bidang dan pada semua tingkatan.¹³

Untuk informasi lebih lanjut lihat Tool (Alat) mengenai RSK dan Gender

Bagian berikut menyajikan beberapa alasan mengapa gender penting dalam proses pembuatan kebijakan keamanan nasional dan bagaimana pengaruh gender terhadap peningkatan pemilikan lokal dan partisipasi menyeluruh. Pada dasarnya, perspektif gender penting karena perspektif ini menimbulkan kesadaran bahwa masyarakat bukanlah kelompok yang homogen tapi merupakan kelompok yang memiliki kebutuhan dan kepentingan yang beraneka ragam. Mengingat bahwa sektor keamanan bertugas melindungi semua kelompok di dalam masyarakat, pembuatan kebijakan keamanan harus memasukkan perspektif gender. Pemasaan perspektif gender ini akan membantu menyusun strategi bagi para aktor sektor keamanan yang mengidentifikasi berbagai kebutuhan – bukan hanya kebutuhan masyarakat atau kelompok de-

mografi dalam masyarakat yang paling menonjol dan istimewa.

Lembaga-lembaga dan personel di sektor keamanan kadang-kadang bisa menjadi sumber ketidakamanan, terutama bagi kelompok-kelompok masyarakat yang tak berdaya. Namun demikian, kekerasan bisa juga berasal dari undang-undang dan kebijakan yang membentuk aturan hukum. Bila kebijakan mengabaikan gender, kebijakan tersebut bisa secara langsung maupun tidak langsung memaafkan kekerasan berbasis gender terhadap wanita, pria, anak lelaki dan anak perempuan; ketidaksetaraan gender dan praktik-praktik peminggiran. Karena itu, proses pembuatan kebijakan harus inklusif dan memadukan perspektif semua kelompok dalam masyarakat tertentu.

3.1 Pemilikan lokal melalui proses pembuatan kebijakan partisipatif

Untuk menciptakan legitimasi dan pemilikan lokal atas kebijakan keamanan tingkat nasional, dan juga konsensus mengenai prioritas keamanan, harus ada suatu proses partisipatif penilaian, perancangan, pelaksanaan dan pemantauan/evaluasi kebijakan. Proses partisipatif juga meningkatkan pertanggungjawaban, transparansi dan keberlanjutan, yang merupakan tiga prinsip utama RSK. Salah satu langkah penting untuk menjamin proses pembuatan kebijakan keamanan partisipatif adalah pelibatan wanita maupun pria dalam pembuatan keputusan (lihat Kotak 4). Partisipasi setara wanita dan pria dalam proses pembuatan kebijakan keamanan lokal, nasional dan internasional sesuai dengan norma dan instrumen hukum internasional, seperti Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 dan membuat struktur tata pemerintahan menjadi lebih mewakili komposisi masyarakat.

Kepatuhan terhadap kewajiban menurut undang-undang dan instrumen hukum internasional

Pemaduan isu gender ke dalam pembuatan kebijakan keamanan nasional diperlukan untuk mematuhi hukum, instrumen hukum, dan norma internasional dan regional mengenai keamanan dan gender. Instrumen hukum utama di antaranya adalah:

- Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1979)
- Deklarasi dan Pijakan Aksi Beijing (1995)
- Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1325 tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (2000)

Untuk informasi lebih lanjut lihat Tool (Alat) mengenai RSK dan Gender

Di banyak negara, wanita masih terpinggirkan dari proses pembuatan keputusan. Misalnya, pemulihan dan peningkatan keamanan Liberia memerlukan restrukturisasi total pasukan keamanan, yang meliputi perumusan NSP dan kebijakan keamanan spesifik sektor. Walaupun Pemerintah Liberia menetapkan kuota 20% untuk partisipasi wanita dalam pasukan keamanan, wanita belum ambil bagian dalam proses pembuatan kebijakan keamanan. Konsultasi nasional dengan para wanita untuk mendapatkan masukan yang berbeda mengenai, misalnya, ketidakamanan sosial dan ekonomi, dan untuk meningkatkan peluang respons terkoordinasi terhadap kekerasan seksual yang sering terjadi, tidak dilakukan.¹⁴ Ini bertentangan dengan pemikiran internasional saat ini yang menegaskan bahwa hanya dengan memberi wanita hak-hak yang setara dengan pria dan akses atas proses pembuatan keputusan pembangunan yang berkelanjutan dapat terlaksana.¹⁵

Pelibatan pria dan wanita dengan posisi yang setara dalam pembuatan kebijakan keamanan juga mengakui bahwa mereka sering mempunyai kebutuhan dan prioritas keamanan yang berbeda. Pendekatan yang berbeda dalam pemberian keamanan dan keadilan diperlukan untuk kelompok yang berbeda agar tercapai akses yang setara bagi semua kelompok masyarakat atas layanan publik ini. Yang penting, penggunaan gender sebagai asas pedoman untuk memperluas perdebatan mengenai pemberian

keamanan dan keadilan bukan sekedar melihat kebutuhan pria dan wanita yang berbeda, tapi juga berkaitan langsung dengan kebutuhan keamanan khusus yang didasarkan pada etnis, kelas, orientasi seksual dan agama.

Berbagai prakarsa dapat diambil untuk menjamin partisipasi penuh dan setara wanita dan pria, yang meliputi:

- Konsultasi menyeluruh dengan organisasi masyarakat dan pemuka masyarakat pedesaan dan perkotaan, termasuk para wanita dan organisasi wanita.
- Pengangkatan wanita untuk badan-badan pembuat keputusan keamanan penting di tingkat kementerian.
- Pengumpulan masukan dari organisasi wanita, kakukus anggota parlemen wanita dan perwakilan dari kementerian urusan wanita dalam proses pembuatan kebijakan keamanan.

Dengan menetapkan suatu proses partisipatif, pedoman mengenai penyediaan layanan yang efektif diperoleh sejak awal. Hasil yang mungkin diperoleh adalah efektivitas operasional yang lebih tinggi, termasuk kemampuan pasukan keamanan untuk memberikan respons terhadap kebutuhan keamanan dan keadilan khusus sebagaimana yang diidentifikasi dalam kebijakan keamanan. Sebagai suatu dokumen

Kotak 4 Manfaat pembuatan kebijakan keamanan partisipatif di Afrika Selatan

Proses transformasi kebijakan dan lembaga keamanan pasca-apartheid Afrika Selatan sering diajukan sebagai praktik RSK partisipatif dan milik lokal yang baik. Misalnya, proses Pengkajian Ulang Pertahanan tahun 1996-1998 meliputi konsultasi nasional yang menjamin partisipasi pemuka agama dan masyarakat, aktivis, wakil-wakil LSM dan organisasi wanita. Dalam proses ini, organisasi-organisasi wanita tingkat akar rumput sangat penting dalam menarik perhatian terhadap masalah-masalah keamanan utama seperti dampak lingkungan dari operasi militer dan pelecehan seksual terhadap wanita. Sebagai tanggapan atas masalah ini, dua sub-komite baru dibentuk di Sekretariat Pertahanan. Akhirnya, sifat partisipatif Pengkajian Ulang Pertahanan diakui telah membantu proses pencapaian konsensus nasional mengenai masalah pertahanan dan menghasilkan legitimasi publik atas struktur keamanan baru.¹⁶

Konsultasi dengan para wanita di organisasi masyarakat sipil dan partai politik juga menghasilkan kebijakan keamanan yang responsif terhadap gender dan menyoroti peran wanita sebagai konsumen dan penyedia keamanan. Misalnya, hal ini terlihat pada Buku Putih Intelijen 1994, Buku Putih Pertahanan Republik Afrika Selatan 1996 dan Buku Putih Keselamatan dan Keamanan 1998.

Pengalaman Afrika Selatan menunjukkan bahwa pelibatan wanita dan wakil-wakil dari organisasi wanita dalam debat yang berkaitan dengan keamanan dapat memperluas pemahaman mengenai apa yang harus dimasukkan dalam kebijakan dan pernyataan keamanan.

Temuan-temuan penting dari proses ini, yang semuanya menimbulkan dampak langsung terhadap pembuatan kebijakan, adalah:¹⁷

1. Afrika Selatan melampaui pembenahan untuk mengubah sektor keamanan dengan mengambil langkah-langkah untuk berkonsultasi dengan masyarakat mengenai peran sektor keamanan dan menempatkan keamanan dan pembangunan manusia sebagai inti dari kerangka keamanan nasionalnya.
2. Para wanita dengan pandangan dan nilai-nilai yang berbeda dan dari semua ras sangat penting dalam menyatakan visi tersebut dan mempengaruhi proses di mana keamanan masyarakat menjadi prioritas negara.
3. Para wanita dari seluruh spektrum politik dikerahkan untuk mencapai keterwakilan 50% dalam negosiasi menjelang pemilihan umum 1994 dan 28% kursi parlemen. Mereka terus mendorong partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan dan tetap menjadi pendukung utama keamanan manusia.
4. Di lembaga keamanan, semakin diakui bahwa wanita:
 - a. Memberikan perspektif penting dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
 - b. Memberikan pengaruh positif sebagai anggota pasukan keamanan.
 - c. Sangat penting dalam membangun perdamaian dan keamanan.
5. Transformasi sektor keamanan tidak akan sempurna bila budaya institusinya tidak berubah. Penanggulangan diskriminasi berbasis gender, sebagaimana diskriminasi rasial, merupakan komponen dan indikator utama transformasi.

Kotak 5 Kekerasan berbasis gender yang dilakukan oleh pasukan keamanan di Sierra Leone²²

Konflik sepuluh tahun di Sierra Leone secara resmi dinyatakan berakhir pada bulan Januari 2002. Angkatan bersenjata dan polisi melakukan kekerasan seksual selama terjadinya konflik tersebut, dan pria tetap terlalu terwakili di kedua lembaga tersebut, yang membatasi usaha pembenahan menurut pola yang lebih tanggap terhadap gender. Budaya militer di sektor keamanan Sierra Leone dapat memperparah dan melembagakan GBV di kalangan bawah personel angkatan bersenjata dan kepolisian.

Sebagai respons atas keadaan ini, masalah HAM telah dipadukan ke dalam pelatihan yang diberikan kepada angkatan bersenjata oleh Tim Penasihat dan Pelatih Militer Internasional (International Military Advisory and Training Team) yang dipimpin Inggris, dan kepada Kepolisian Sierra Leone (yang diprakarsai oleh Proyek Keselamatan dan Keamanan Masyarakat Persemakmuran [the Commonwealth Community Safety and Security Project]). Pelatihan, kode perilaku, penerapan tindakan hukuman, penyusunan protokol dan mekanisme institusi untuk menangani pengaduan kasus GBV, dan peningkatan keterwakilan wanita dapat membantu menangani kasus GBV dalam pasukan keamanan.

yang disusun dengan kepemimpinan lembaga eksekutif dan diundangkan oleh parlemen, kebijakan seperti ini juga merupakan instrumen pendukung yang efektif untuk meminta pertanggungjawaban pimpinan politik atas janji-janji yang mereka buat.

Dengan demikian, pendekatan partisipatif yang tanggap terhadap gender dalam proses pembuatan kebijakan keamanan menjamin akses setara oleh berbagai kelompok, baik atas kebijakan itu sendiri maupun proses di mana kebijakan tersebut disusun, dilaksanakan dan dievaluasi. Ini sangat penting dalam konteks pasca-konflik dan di beberapa negara yang sedang dalam masa transisi di mana struktur keamanan dibangun dari awal setelah keruntuhan mendadak atau perlahannya.

3.2 Kebijakan keamanan komprehensif yang mempertimbangkan kebutuhan keamanan yang beragam

Sebagaimana disebutkan pada Bagian 2, kebijakan keamanan semakin dirancang untuk menghadapi ancaman keamanan internal maupun eksternal. Sejalan dengan fokus keamanan manusia pada usaha memenuhi kebutuhan keamanan individu dan masyarakat, kebijakan keamanan komprehensif mempertimbangkan kebutuhan keamanan wanita, pria, anak perempuan dan anak lelaki yang berbeda, termasuk ancaman keamanan internal seperti kekerasan berbasis gender (GBV).

Lihat Tool (Alat) mengenai RSK dan Gender

Barangkali, GBV merupakan salah satu wujud yang paling jelas dari perlunya pendekatan yang berbeda dalam pemberian keamanan dan keadilan. GBV adalah fenomena global yang mempengaruhi wanita dan anak perempuan, serta pria dan anak lelaki. Menurut data statistik, UNIFEM memperkirakan bahwa satu dari tiga wanita di seluruh dunia rentan terhadap suatu bentuk GBV, seperti penganiayaan, pemer-

kosaan, perdagangan atau pemukulan.¹⁸ Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (The Centers for Disease Control and Prevention) menyatakan bahwa setiap tahun 1.500.000 wanita dan lebih dari 800.000 pria di Amerika Serikat diperkosa atau dianiaya secara fisik oleh pasangan intimnya.¹⁹ Di Jamaika, Strategi Keamanan Nasional (the National Security Strategy) mengakui bahwa kekerasan di dalam rumah tangga mempengaruhi pola umum kejahatan dan kekerasan, akibat pengaruh negatifnya terhadap struktur sosial dan perannya dalam memasyarakatkan penggunaan kekerasan di kalangan pemuda sebagai cara menyelesaikan perselisihan.²⁰ Dampak finansial dari GBV juga besar, yang secara langsung mempengaruhi efektivitas penyediaan layanan serta sektor-sektor negara lainnya. Menurut Departemen Dalam Negeri Inggris, kekerasan di dalam rumah tangga merupakan penyebab utama sakitnya para wanita berusia 19-44 tahun, yang menelan biaya £23 miliar per tahun di Inggris.²¹

Isu gender, terutama GBV, sering dihubungkan dengan wanita dan anak perempuan. Namun demikian, isu gender juga berkaitan dengan pria dan anak lelaki, dan pertimbangan mengenai kebutuhan keamanan khusus mereka dalam proses pembuatan kebijakan menjamin suatu pendekatan yang komprehensif. Misalnya, kekerasan seksual terhadap pria di angkatan bersenjata dan lembaga pemasyarakatan merupakan masalah yang sangat terlarang namun patut diperhatikan. Sebuah penelitian mengenai lembaga pemasyarakatan di empat negara bagian di Amerika Serikat menemukan bahwa hampir satu dari lima narapidana pria melaporkan kejadian hubungan seksual di bawah tekanan atau paksaan ketika dipenjarakan.²³

GBV terhadap pria dan anak lelaki juga menjadi masalah ketika terjadi konflik, di mana mereka mengalami kekerasan seksual, pembantaian berdasarkan jenis kelamin dan penugasan militer secara paksa. Meskipun hal ini sering terjadi, program GBV yang ditujukan untuk penyintas pria maupun anak lelaki praktis tidak ada dalam konteks pasca-konflik.²⁴

Mengingat tingkat kejadian yang tinggi dan dampak sosial dan finansial yang besar dari GBV, GBV merupakan masalah keamanan yang harus dipertimbangkan dalam kebijakan keamanan nasional – baik NSP maupun kebijakan spesifik sektor atau kebijakan spesifik masalah.

3.3 Non-diskriminasi dalam kebijakan keamanan dan lembaga sektor keamanan

Penurunan kasus diskriminasi oleh personel sektor keamanan berdasarkan agama, jenis kelamin, ras, orientasi seksual atau landasan keliru lainnya dapat membangun kepercayaan, meningkatkan legitimasi dan memperbaiki pemberian keamanan dan keadilan. Sebagai suatu dokumen strategis, kebijakan keamanan membuat pemerintah bertekad menangani masalah keamanan dan keadilan, baik di bidang publik maupun di kalangan bawah personel pasukan keamanan sendiri. Dengan demikian, suatu kebijakan keamanan dapat menetapkan peraturan pelindung terhadap diskriminasi di lembaga-lembaga sektor keamanan. Pembuatan kebijakan keamanan yang tanggap terhadap gender membantu menjamin agar kebijakan tidak memasukkan kata-kata yang mendukung terjadinya diskriminasi. Dengan memasukkan juga pernyataan-pernyataan khusus mengenai masalah non-diskriminasi, kebijakan keamanan dapat memberikan dampak positif terhadap struktur dan personel angkatan bersenjata, kepolisian, badan intelijen dan lembaga-lembaga sektor keamanan lainnya.

4 Bagaimana memadukan gender ke dalam kebijakan keamanan?

Bagian ini menyajikan contoh dan saran mengenai bagaimana memastikan agar proses pembuatan kebijakan keamanan memasukkan isu gender. Karena penyusunan kebijakan keamanan selalu berbeda dalam setiap konteks, terdapat tantangan dan peluang yang berbeda terhadap pemaduan isu gender. Saran-saran berikut harus disesuaikan dengan konteks setempat. Untuk pembahasan mengenai pembuatan kebijakan keamanan dalam konteks khusus, lihat Bagian 5. Bagian ini disusun menurut lembaga yang berbeda yang terlibat dalam pembuatan kebijakan keamanan: pemerintah pusat (termasuk badan koordinasi keamanan dan komite perancang kebijakan), parlemen, pemerintah daerah dan OMS. Bagian ini juga membahas dua masalah yang saling berkaitan yang harus dipertimbangkan di semua lembaga: pelatihan gender dan pemantauan serta evaluasi gender.

Sebagaimana yang telah dijelaskan, penyusunan atau revisi kebijakan keamanan nasional memerlukan masukan dari berbagai aktor, yang meliputi penyedia keamanan internal dan eksternal. Jadi, perancangan kebijakan keamanan yang efektif memerlukan banyak sumber daya, baik sumber daya manusia maupun keuangan. Oleh sebab itu, kebijakan keamanan nasional mungkin jarang sekali direvisi, diperdebatkan

dan dikonsultasikan secara menyeluruh. Karena itu, bila muncul peluang untuk pembuatan kebijakan baru, landasannya harus sudah tersedia untuk menjamin agar isu gender dimasukkan.

4.1 Pemerintah pusat

Diperlukan komitmen politik lembaga eksekutif untuk memprakarsai penyusunan atau perubahan suatu kebijakan keamanan. Misalnya, menteri pertahanan biasanya akan mengawasi perwujudan perubahan kebijakan pertahanan. Karena itu, komitmen terhadap proses pembuatan kebijakan keamanan yang inklusif dan pertimbangan mengenai isu gender harus ditanamkan pada tingkat pemerintahan tertinggi dan di kalangan staf tingkat tinggi kementerian untuk menjamin proses dan hasil yang tanggap terhadap gender.

Dalam hal NSP **Kanada**,²⁵ perancangan kebijakan menjadi kewenangan penuh Kantor Dewan Penasihat (Privy Council Office). Perdana Menteri memutuskan bahwa proses perumusan kebijakan tidak boleh interdepartemental karena diyakini bahwa perumusan interdepartemental ini akan memperlambat proses perancangan kebijakan. Dengan demikian, para aktor di dalam maupun di luar lembaga pemerintahan, termasuk aktor yang memiliki keahlian gender, tidak dilibatkan. Memasukkan perspektif yang berbeda mengenai makna keamanan memang memakan waktu, tapi diperlukan untuk menghasilkan kebijakan keamanan yang kuat dan terpadu. Bila proses pembuatan kebijakan yang eksklusif diterapkan, hal ini mengurangi transparansi, pengawasan demokrasi dan titik mula untuk menangani isu gender.

Beberapa langkah dapat diambil, baik oleh staf kementerian, parlemen atau pun OMS, untuk membangun kemampuan gender dan komitmen pemerintah dan staf tingkat atas yang terlibat dalam pembuatan kebijakan keamanan:

- Peningkatan kesadaran di kalangan kepala negara, para menteri, staf kementerian tingkat tinggi dan personel penting di lembaga-lembaga sektor keamanan mengenai komitmen internasional dan nasional terhadap kesetaraan gender dan HAM.
- Adakan pengarahan dan laporan gender untuk pimpinan tingkat tinggi mengenai masalah kebijakan, peningkatan penyediaan layanan dan efektivitas operasional penerapan pendekatan bergender dalam pembuatan kebijakan.
- Rancang naskah pidato mengenai masalah yang berkaitan dengan keamanan untuk staf tingkat tinggi, yang benar-benar membahas isu gender.
- Berikan naskah pengarahan kepada pimpinan tingkat tinggi yang menjelaskan ke mana isu gender dapat dimasukkan dalam kebijakan keamanan, dan ambil bagian dalam menentukan tujuan kebijakan tersebut.
- Lakukan lobi untuk pengangkatan wanita yang

memenuhi syarat dalam staf pimpinan dan untuk pemasukan pemahaman mengenai dan komitmen nyata terhadap kesetaraan gender dalam kerangka acuan.²⁶

- Prakarsai program pendampingan (mentoring) yang menempatkan pakar gender bersama staf tingkat tinggi untuk membangun kemampuan gender mereka.

Badan koordinasi keamanan

Dewan Keamanan Nasional (NSC, National Security Council) menjamin tindakan yang terkoordinasi dan pemaduan berbagai masalah kebijakan, legislatif, struktural dan pengawasan yang berkaitan dengan keamanan. NSC – atau badan yang serupa – bisa juga diminta mengkoordinasikan kebijakan, melaksanakan kebijakan, menilai atau memberi nasihat dan mengalokasikan sumber daya untuk menghadapi ancaman keamanan. Karena itu, badan koordinasi ini merupakan titik mula yang sangat penting untuk menjamin agar isu gender dimasukkan dalam agenda dan agar wanita berpartisipasi dalam pembuatan keputusan.

NSC di **Sierra Leone**, Kantor Kabinet di **Inggris**, atau Dewan Penasihat Keamanan Nasional di **Kanada** memiliki berbagai fungsi, tetapi semuanya bertujuan memusatkan pemikiran pejabat pemerintahan tingkat atas mengenai masalah keamanan nasional.²⁷ Namun demikian, di negara-negara demokrasi baru dan negara-negara pasca-konflik kemampuan pemerintah mengelola dan mengoordinasikan respons terhadap masalah keamanan nasional mungkin masih rendah. Begitu pula, badan seperti ini kadang-kadang didominasi oleh angkatan bersenjata dan tidak ada keseimbangan sipil-militer.

Walaupun NSC, atau badan yang serupa di negara yang berbeda memiliki berbagai anggota dan tugas yang berbeda, badan seperti ini jarang melibatkan wanita atau menangani isu gender:

- Di **Nepal** pada tahun 2004, NSC terdiri dari personel angkatan bersenjata dan wakil-wakil dari Kementerian Pertahanan dan kantor Perdana Menteri, tapi wanita tidak dilibatkan (kenyataannya, tidak ada wanita berpangkat tinggi di kepolisian atau kementerian penting di Pemerintah Nepal).
- NSC **Pakistan** juga memiliki anggota yang terbatas karena keamanan nasional dirumuskan secara sempit di bawah judul kedaulatan, integritas, pertahanan, keamanan negara dan 'manajemen krisis'.²⁸ NSC **Amerika Serikat** juga memiliki sedikit anggota, yang secara resmi meliputi Presiden, Wakil Presiden, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan, dengan kehadiran tetap para Kepala Staf Gabungan, Direktur Badan Intelijen Pusat (CIA, Central Intelligence Agency) dan Penasihat Keamanan Nasional Presiden. Keseimbangan gender NSC Pakistan dan Amerika Serikat sangat rendah, dan masalah yang berkaitan dengan ketidakamanan pria dan wanita umumnya tidak dibedakan atau dipertimbangkan. Salah satu sebabnya adalah lembaga ini umumnya menangani masalah politik makro, bukan membedakan kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Sebagaimana diuraikan pada Bagian 3.1, berbagai manfaat dapat dihasilkan dari peningkatan partisipasi wanita dan pemaduan isu gender ke dalam pembuatan keputusan keamanan. Misalnya, konsultasi dengan wakil-wakil dari kaukus anggota parlemen wanita dapat memperluas perdebatan di NSC mengenai masalah keamanan mana yang akan diutamakan. Pertimbangan isu gender dapat menimbulkan diskusi yang produktif mengenai pendekatan keamanan dan prioritas keamanan yang dapat diterima, serta metode pemberian keamanan dan keadilan yang efektif.

Langkah-langkah yang dapat diambil untuk memajukan isu gender dan meningkatkan partisipasi wanita di badan koordinasi keamanan adalah:

- Mengutamakan pengangkatan wakil-wakil wanita untuk NSC.
- Melibatkan atau lakukan konsultasi dengan wakil-wakil dari kementerian yang menangani isu gender dan wanita, aparat pemerintahan lainnya yang menangani isu gender atau kaukus anggota parlemen wanita.
- Membangun kemampuan gender para anggota NSC melalui pelatihan, pengarahan, pendampingan (mentoring) dan prakarsa lainnya. Lihat Bagian 4.5 mengenai Pelatihan Gender.
- Menerapkan mekanisme untuk menjamin pelaksanaan konsultasi dengan para pakar gender dari luar dan wakil-wakil dari organisasi wanita.

Salah satu tantangan dalam peningkatan pengangkatan wanita untuk NSC adalah di sebagian besar negara para wanita masih terpinggirkan dari jabatan politik tingkat tinggi, dan karena itu sedikit sekali wanita yang mencapai jabatan yang terdapat di dewan seperti ini. Misalnya, pada tahun 2005 hanya terdapat 12 (6,6%) wanita yang menjadi menteri pertahanan dan urusan veteran dan 29 (15,8%) wanita yang menjadi menteri kehakiman dalam sampel 183 negara.²⁹ Karena itu, prakarsa untuk meningkatkan jumlah wanita dalam jabatan politik tingkat tinggi juga diperlukan, seperti: beasiswa bagi para wanita untuk mengikuti program universitas yang sesuai, pembangunan kemampuan bagi para anggota parlemen wanita dan kuota di partai politik. Pelibatan wanita di badan koordinasi keamanan belum tentu berarti perhatian lebih besar akan diberikan pada isu gender, tapi keanekaragaman pendapat dan pengalaman di antara para anggota NSC akan menghasilkan lebih banyak perspektif yang dapat dipertimbangkan.

Komite perancang kebijakan keamanan

Agar gender terlihat jelas dalam kebijakan keamanan, badan khusus yang merancang kebijakan keamanan harus memiliki kemampuan memahami kebutuhan keamanan pria, wanita, anak perempuan, dan anak lelaki yang berbeda dan bagaimana kebijakan keamanan yang diajukan akan mempengaruhi kebutuhan ini. Badan perancang kebijakan keamanan bisa berupa komite tetap atau komite ad hoc. Kebijakan dapat dirancang oleh tim yang anggotanya berasal dari satu departemen pemerintah (misalnya, kebijakan mengenai kepolisian) atau dari beberapa departemen

(misalnya, untuk NSP).

Para anggota komite perancang harus memiliki keahlian teknis untuk menyusun kebijakan yang komprehensif, pasti dan jelas. Kriteria utama pemilihan anggota komite tersebut adalah:

- Keahlian dan pengetahuan teknis – termasuk keahlian dan pengetahuan dalam memadukan isu gender.
- Keterwakilan sehubungan dengan badan pelaksana dan pembuat keputusan utama – mungkin meliputi wakil dari kementerian yang bertanggung jawab atas isu gender.
- Komitmen terhadap pembenahan yang demokratis – termasuk promosi kesetaraan gender.³⁰

Badan pengawas seperti parlemen atau OMS dapat memainkan peran penting dalam mendukung pelibatan pakar gender di komite perancang, atau mendukung agar para anggota komite mengikuti pelatihan yang memasukkan komponen yang berkaitan dengan gender.

Untuk menjamin kebijakan keamanan yang tanggap terhadap gender, komite perancang harus dengan jelas mempertimbangkan isu gender dan menggunakan bahasa yang peka terhadap gender.

Pertimbangkan isu gender dengan jelas

Tergantung pada jenis kebijakan keamanan yang sedang disusun, isu gender yang harus disoroti meliputi (lihat Kotak 6):

- Pentingnya mencapai kesetaraan antara pria dan wanita, serta kelompok sosial, agama dan etnis dalam keamanan nasional.
- Penegasan hak setara semua pria dan wanita untuk berpartisipasi di lembaga-lembaga sektor keamanan.
- GBV terhadap pria, wanita, anak perempuan dan anak lelaki sebagai ancaman keamanan internal utama; dan strategi untuk mencegah, merespons dan memberikan sanksi terhadap GBV, dengan alokasi sumber daya manusia dan keuangan yang sesuai.
- Penghapusan diskriminasi di lembaga-lembaga sektor keamanan atau dalam penyediaan layanan keamanan berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, orientasi seksual atau landasan keliru lainnya.
- Kode perilaku institusi, termasuk ketentuan khusus mengenai diskriminasi, pelecehan seksual dan bentuk-bentuk GBV lainnya.
- Penetapan mekanisme yang menjamin partisipasi masyarakat sipil dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan keamanan, proses RSK dan lembaga-lembaga sektor keamanan.

Berbagai jenis kebijakan keamanan di negara yang berbeda telah mempertimbangkan isu gender dengan cara seperti ini. Buku Putih Pertahanan Sierra Leone menyatakan bahwa 'Kementerian Pertahanan bersama dengan RSLAF (Republic of Sierra Leone Armed Forces – Angkatan Bersenjata Republik Sierra Leone) bertekad merekrut dan melatih kembali personel

personel berkemampuan tinggi tanpa melihat suku, daerah, gender, agama...'.³¹ Masalah perdagangan manusia dimasukkan dalam Strategi Keamanan Nasional Rumania dan Ukraina. Dalam kebijakan Ukraina masalah ini terdapat di bawah judul 'Pastikan Kondisi Eksternal yang Menguntungkan bagi Pembangunan dan Keamanan Negara'.³² Di Rumania, 'Strategi tersebut menegaskan perlunya pelaksanaan beberapa cara untuk mendorong solidaritas nasional dan tanggung jawab warga negara, perhatian pada kesetaraan pekerja pria dan wanita, dan peluang yang setara untuk mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan serta perlindungan sosial'.³³

Gunakan bahasa yang peka terhadap gender

Penggunaan bahasa yang 'inklusif gender' dan 'spesifik gender' dalam kebijakan sektor keamanan juga penting untuk menghindari diskriminasi atau eksklusivitas. Penggunaan umum kata 'he' (dia lelaki) atau 'man' (pria) tidak memasukkan wanita. Banyak kebijakan yang berkaitan dengan keamanan, dari Buku Putih Pertahanan Sierra Leone sampai Buku Putih Pertahanan Irlandia, misalnya mengakui ini dengan merujuk pada 'servicemen and women' (anggota angkatan bersenjata pria maupun wanita). NSP lainnya, seperti NSP Rusia dan Amerika Serikat, tidak membedakan pria dan wanita. Walaupun penggunaan 'bahasa yang netral gender' – misalnya 'people' (orang-orang) sebagai pengganti 'men and women' (pria dan wanita) – sesuai dalam banyak konteks, penggunaan bahasa yang netral gender ini dapat membatasi pengakuan mengenai perbedaan gender, dan dapat menimbulkan asumsi bahwa semua kelompok keamanan dalam masyarakat memiliki kebutuhan keamanan yang sama.

Yang terakhir, ada sebagian NSP seperti NSP Jamaika, Georgia dan Ukraina, yang terus menggunakan bahasa seperti 'manpower' (tenaga pria) dan 'man-made hazards' (bahaya yang ditimbulkan pria).³⁴ Ini adalah istilah diskriminatif yang berasal dari gagasan bahwa hanya pria (bukan wanita) yang aktif dalam kehidupan publik.

Contoh bahasa yang peka terhadap gender meliputi:

- Servicemen and women (anggota angkatan bersenjata pria maupun wanita) – bukan servicemen (anggota angkatan bersenjata pria)
- Police officer (polisi) – bukan policeman (polisi pria)
- Humankind (umat manusia) – bukan mankind (umat pria)
- Artificial (tiruan) atau manufactured (buatan) – bukan man-made (buatan pria)
- She/he (dia perempuan/dia lelaki) atau he/she (dia lelaki/dia perempuan) – bukan he (dia lelaki)
- Staffed (dikelola pegawai) – bukan manned (dikelola pria)
- Labour (pekerja), staffing (kepegawaian), workforce (tenaga kerja) – bukan manpower (tenaga pria)
- Chair atau Chairperson (Ketua) – bukan Chairman (ketua pria)
- Sebutkan men (pria), women (wanita), girls (anak

Kotak 6

Responsivitas gender dalam kebijakan keamanan Afrika Selatan

Buku Putih Intelijen, Pertahanan Nasional, serta Keselamatan dan Keamanan Afrika Selatan menggunakan bahasa yang peka terhadap gender dan menangani GBV dan diskriminasi, serta partisipasi setara di lembaga-lembaga sektor keamanan.

Buku Putih Intelijen (1994):

Kompilasi suatu badan intelijen nasional akan berusaha mencerminkan komposisi gender dan ras masyarakat dan juga mempertimbangkan kriteria objektif keunggulan. Untuk mencapai tujuan ini, suatu program aksi afirmatif akan dilaksanakan untuk mengatasi ketidakseimbangan.³⁵

Buku Putih Pertahanan Nasional Republik Afrika Selatan (1996):

Untuk mendapatkan legitimasi angkatan bersenjata, DOD [Dephan, Departemen Pertahanan] bertekad mencapai tujuan mengatasi warisan diskriminasi ras dan gender. Departemen ini akan menjamin agar Pasukan Pertahanan Nasional Afrika Selatan [SANDF, South African National Defence Force], dan khususnya kepengimpinannya, secara umum mewakili rakyat Afrika Selatan.

DOD mengakui hak wanita untuk bertugas di semua pangkat dan jabatan, termasuk tugas tempur.³⁶

Buku Putih Keselamatan dan Keamanan (1998):

Secara khusus menyebutkan penanganan tindak pidana seksual, pemerkosaan atau kekerasan dalam rumah tangga dengan 'lebih bermartabat, bersimpati dan berperhatian'. Buku ini menyerukan strategi pencegahan kejahatan terhadap kelompok-kelompok yang paling berisiko melakukan pelanggaran hukum atau menjadi korban kejahatan, yang meliputi 'masyarakat miskin, pemuda, wanita dan anak-anak serta orang cacat'.³⁷

perempuan) dan boys (anak lelaki) sesuai konteks – ketimbang people (orang-orang)

4.2 Parlemen

Lembaga eksekutif mengajukan kebijakan keamanan dan parlemen biasanya menerima, mengubah atau menolak kebijakan; mengontrol anggaran; dan dapat memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya (lihat Kotak 7). Walaupun fungsi parlemen berbeda antar-negara, fungsi tersebut biasanya mencakup dua tugas berkaitan dengan penyusunan kebijakan: memantau lembaga eksekutif dan mewakili kepentingan rakyat. Ini berarti parlemen dapat memainkan peran penting dalam menjamin agar kebijakan tersebut memperhatikan kebutuhan khusus pria, anak lelaki, wanita dan anak perempuan, termasuk melalui: proses pembuatan kebijakan partisipatif dan keterwakilan setara pria dan wanita, yang meliputi kelompok sosial, etnis dan agama yang berbeda.

Lihat Tool (Alat) mengenai RSK dan Gender

Di negara-negara demokrasi baru dan negara-negara pasca-konflik, konsep atau pun praktik pengawasan demokrasi dan keuangan tidak mungkin berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu akibatnya adalah tidak adanya koordinasi dan pembagian informasi antara lembaga sipil dan militer, dan keengganan di pihak pemerintah dan parlemen untuk menerima pengawasan sipil. Karena itu, pertanggungjawaban, transparansi dan pelibatan sipil dalam merancang respons terhadap masalah keamanan nasional masih terbatas. Namun demikian, walaupun parlemen di negara-negara demokrasi baru tidak memiliki kekuasaan membuat keputusan yang signifikan,

mereka bisa menjadi forum penting untuk transparansi dan memainkan peran yang signifikan terhadap pertanggungjawaban lembaga eksekutif dan pengawasan kekuasaan eksekutif.

Begitu pula, dalam sistem politik di mana disiplin partai yang kuat berlaku di lembaga legislatif dan komite-komitennya, peran pengawasan parlemen dalam praktiknya mungkin sangat terbatas. Di Kanada, parlemen dikritik karena asal menyetujui (rubber stamp) keputusan kebijakan yang dibuat secara sentralistik oleh Perdana Menteri dan para penasihat politik dan penasihat kabinet senior. Dalam kebijakan pertahanan dan keamanan, komite dan subkomite legislatif belum berperan sebagai mekanisme pengawasan yang efektif, dan muncul tuduhan bahwa tidak ada pembahasan yang sungguh-sungguh mengenai kebijakan pertahanan di parlemen Kanada.³⁸

Proses pembuatan kebijakan partisipatif

Keterlibatan parlemen dalam kebijakan keamanan sangat penting untuk menjamin transparansi dan pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Hal ini dicapai melalui perdebatan terbuka, konsultasi dan ketersediaan informasi bagi masyarakat mengenai kebijakan keamanan pemerintah.

Konsultasi dengan komite-komite parlemen yang terkait mengenai NSP – dan kebijakan keamanan lainnya – akan paling berhasil bila dilakukan pada tahap awal dalam proses perancangan sehingga perubahan dan perombakan kebijakan dapat dilakukan. Para anggota parlemen dan komite parlemen tidak boleh sekedar diberi dokumen akhir, yang dapat mereka terima atau tolak.

Parlemen – termasuk komite pertahanan dan keamanan – juga harus proaktif menjamin agar kebijakan keamanan dibuat melalui konsultasi publik yang sesuai. Walaupun proses ini belum tentu mahal dari segi biayanya, proses ini memerlukan waktu, dana, sumber daya manusia dan kemauan politik yang mungkin tidak ada di dalam negeri di negara-negara

Kotak 7 Peran parlemen dalam pembuatan kebijakan keamanan³⁹

Penyusunan

Karena penyusunan kebijakan keamanan adalah tugas lembaga eksekutif dan departemen serta badan pemerintah yang berwenang, peran parlemen pada tahap penyusunan kebijakan terbatas.

Pembuatan keputusan

Ketika kebijakan keamanan diajukan ke parlemen, parlemen bertanggung jawab langsung atas kebijakan tersebut. Parlemen dapat memberikan persetujuannya terhadap kebijakan dan perundang-undangan baru yang diajukan pemerintah, menolaknya atau mengusulkan perubahan. Parlemen juga memiliki kekuasaan tertentu sehubungan dengan penyediaan anggaran melalui tahap-tahap utama putaran anggaran: penyusunan anggaran, persetujuan anggaran, pelaksanaan atau pembelanjaan, dan pemeriksaan (audit) atau peninjauan. Lihat Bagian 4.6 mengenai analisis anggaran gender.

Kerangka waktu proses pembuatan keputusan harus memungkinkan konsultasi publik lebih lanjut dengan berbagai perwakilan rakyat. Hal ini akan meningkatkan potensi dukungan publik atas kebijakan keamanan tersebut dan menjamin agar kebijakan tersebut memenuhi kebutuhan rakyat.

Pelaksanaan

Selama pelaksanaan kebijakan keamanan, parlemen berperan mengawasi kegiatan pemerintah, termasuk melalui analisis anggaran yang berkelanjutan. Kebijakan keamanan menimbulkan dampak keuangan yang besar dan pada dasarnya menyangkut uang pembayar pajak.

Penilaian dan pelajaran yang diperoleh

Parlemen memainkan peran dalam memeriksa angka-angka maupun kinerja sehubungan dengan pelaksanaan kebijakan keamanan. Laporan kemajuan oleh badan pemerintah yang terkait sangat penting untuk mengontrol proses dan mendapatkan gambaran apakah tujuan yang dipaparkan dalam kebijakan keamanan sudah terlaksana.

pasca-konflik atau negara-negara berkembang. Karena itu, dukungan lembaga donor mungkin diperlukan untuk menanggung berbagai biaya, misalnya, lokakarya di daerah pedesaan. Lembaga donor juga dapat mendanai proses konsultasi yang secara khusus dirancang untuk meningkatkan partisipasi para wanita dan kelompok masyarakat lainnya yang sering terpinggirkan selama penyusunan kebijakan keamanan.⁴⁰

Mekanisme untuk menjamin partisipasi bisa meliputi:

- Konsultasi terencana dengan perwakilan OMS, termasuk organisasi wanita perkotaan dan pedesaan (lihat Kotak 10).
- Pertemuan di balai kota dengan interaksi langsung antara para pemimpin politik dan masyarakat.
- Dengar pendapat parlemen dan debat terbuka.
- Bila perlu, adakan pertemuan terpisah dengan kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggirkan di tingkat lokal, yang mungkin tidak berpartisipasi dalam pertemuan publik dengan kelompok masyarakat mayoritas.

Untuk menjamin partisipasi menyeluruh dan representatif, langkah-langkah khusus harus diambil untuk melibatkan:

- Organisasi masyarakat wanita pedesaan dan perkotaan
- Serikat pekerja
- Organisasi keagamaan
- Pemuka masyarakat dan aktivis
- Organisasi pemuda
- Perhimpunan masyarakat pribumi, etnis dan

masyarakat minoritas lainnya

- Perhimpunan orang cacat
- Kelompok pembela anak
- Akademisi dan peneliti
- Perhimpunan masyarakat migran
- Pakar gender
- Organisasi internasional
- Organisasi keadilan dan layanan sosial

Keterwakilan setara pria dan wanita

Dalam praktiknya, para anggota parlemen lebih sering melakukan kontak berkala dan langsung dengan masyarakat umum daripada lembaga eksekutif, dan dengan demikian berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengetahui masalah keamanan masyarakat. Namun demikian, dari perspektif keterwakilan setara, perbandingan wanita dan pria di sebagian besar parlemen di seluruh dunia tidak setara. Pada tahun 2006, 83,1% dari anggota parlemen di seluruh dunia adalah pria.⁴¹ Selain itu, anggota parlemen jarang terlibat dalam komite yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan. Karena itu, untuk menjamin masukan dari para anggota parlemen wanita dalam pembuatan kebijakan keamanan mungkin perlu dilakukan usaha untuk:

- Meningkatkan partisipasi wanita di komite pertahanan dan keamanan, termasuk sebagai ketua.
- Mendorong para wanita untuk mengadakan pertemuan lintas-partai membahas masalah yang berkaitan dengan keamanan dan menyusun program dan strategi bersama untuk memberikan masukan dalam pembahasan kebijakan yang lebih menyeluruh.

Kotak 8 Memadukan gender ke dalam pembuatan kebijakan keamanan: peran wanita di Kongres Nasional Afrika (ANC, African National Congress) di Afrika Selatan⁴²

Transisi Afrika Selatan menuju demokrasi memperlihatkan bagaimana suatu lingkungan politik yang kondusif, pembentukan liga wanita dalam partai politik, dan advokasi isu gender di seluruh spektrum politik dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan keamanan nasional.

Ruang politik untuk menangani isu gender diciptakan oleh para wanita di organisasi masyarakat sipil dan partai politik. Misalnya, prihatin karena kaum wanita sedang terpinggirkan, Liga Wanita Kongres Nasional Afrika (ANC) dibentuk kembali pada tahun 1990 dan menyerukan pelibatan wanita dalam jabatan kepemimpinan dan pemasukan kesetaraan gender dalam program dan kebijakan ANC. Advokasi mereka terlihat jelas dalam publikasi ANC tahun 1992 berjudul *Ready to Govern: Policy Guidelines for a Democratic South Africa* (Siap Memerintah: Panduan Kebijakan menuju Afrika Selatan yang Demokratis). Dokumen ini mengusulkan penerapan empat nilai yang saling berkaitan: demokrasi dan otoritas sipil, keamanan manusia, anti-militerisme dan kesetaraan gender. Dengan penekanan pada kesetaraan gender, manifesto tersebut menyoroti tujuan nonseksisme dan perlunya menciptakan badan-badan khusus untuk menjamin pelaksanaan kebijakan peluang setara. Sehubungan dengan lembaga-lembaga sektor keamanan, manifesto tersebut menyatakan kembali bahwa mereka harus menghormati gagasan ideal demokrasi, non-rasialisme, dan non-seksisme; mencerminkan komposisi nasional dan gender masyarakat Afrika Selatan; dan mengakui bahwa 'diskriminasi gender telah meringgirkan atau menurunkan partisipasi wanita di semua lembaga sosioekonomi dan politik'.⁴³

Para wanita anggota ANC dan organisasi masyarakat sipil juga dipuji karena mengutamakan perhatian pada keamanan manusia, sehingga mengubah pembahasan dari isu 'keamanan negara' menjadi keamanan sebagai suatu masalah umum yang berkaitan dengan masyarakat. Ini terlihat jelas pada penggunaan pendekatan keamanan manusia dan seruan demiliterisasi keamanan dengan dimensi politik, ekonomi, sosial dan lingkungan dalam *Ready to Govern* (Siap Memerintah).

- Mendukung pembentukan kaukus wanita dan koalisi di parlemen dan di partai politik (lihat Kotak 8).
- Mendorong pembentukan kuota nasional atau partai untuk partisipasi minimum wanita dan pria.

Selain menjamin keterwakilan yang setara, perlu dibangun kesadaran dan pemahaman mengenai isu gender di kalangan anggota parlemen, khususnya pria dan wanita yang terlibat dalam komite pertahanan dan keamanan.

4.3 Pemerintah daerah

Untuk menjamin pelaksanaan penuh kebijakan keamanan tingkat nasional, harus diambil prakarsa pada tingkat daerah. Selain itu, komite keamanan tingkat daerah, misalnya, dapat memberikan masukan penting untuk kebijakan keamanan tingkat nasional, dengan memastikan bahwa kebijakan tersebut mencerminkan realitas dan prioritas keamanan daerah. Pengalaman menunjukkan bahwa analisis dan strategi keamanan lokal sangat penting untuk menjamin agar ketidakamanan tingkat masyarakat ditangani secara efektif. Prakarsa ini dapat menjadi titik mula penting untuk memadukan isu gender ke dalam pelaksanaan kebijakan keamanan.

Contoh prakarsa yang dapat diambil oleh pemerintah kota, lembaga sektor keamanan daerah, atau organisasi masyarakat sipil meliputi:

- Audit keamanan/keselamatan
- Rencana keamanan warga/masyarakat
- Komite atau dewan keamanan/keselamatan
- Forum polisi masyarakat

Forum polisi masyarakat, rencana keamanan dan audit keselamatan

Di Afrika Selatan, pemerintah daerah dan Kepolisian

Afrika Selatan berpartisipasi dalam dan bekerja sama dengan Forum Polisi Masyarakat (CPF - Community Police Forums) untuk menetapkan prioritas dan tujuan bersama mengenai pencegahan kejahatan. CPF melibatkan OMS dalam merumuskan prioritas perpolisian lokal dan prakarsa pencegahan kejahatan. Kegiatan CPF didasarkan pada rencana keamanan masyarakat, yang mengidentifikasi: program, proyek atau tindakan yang akan dilaksanakan CPF; dari mana CPF akan mendapatkan dana untuk proyek-proyeknya; dan bagaimana proyek tersebut akan mempromosikan tujuan CPF. Pada gilirannya, rencana keamanan masyarakat didasarkan pada audit keamanan masyarakat yang membantu:

- Memusatkan perhatian pada masalah yang paling serius bila sumber daya Anda terbatas.
- Memberikan fakta-fakta bila orang tidak sependapat mengenai masalah yang paling serius.
- Mengoordinasikan kerja organisasi yang berbeda untuk mencegah duplikasi.

Audit keselamatan masyarakat dilakukan melalui proses lima tahap untuk mengidentifikasi:

1. Masalah kejahatan dalam masyarakat: misalnya, kekerasan dalam rumah tangga.
2. Organisasi mana melakukan apa: Sebagian organisasi mungkin sudah melaksanakan proyek pencegahan kejahatan, dan karena itu mungkin sudah melakukan kegiatan untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga dan mendukung korban langsung maupun tak langsungnya.
3. Karakteristik fisik dan sosial daerah: Untuk memahami penyebab kejahatan dalam suatu masyarakat, Anda harus mengetahui karakteristik fisik dan sosial daerahnya. Misalnya: orang muda sering lebih mungkin melakukan kejahatan; wanita lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan penganiayaan seksual; pria muda lebih rentan mengalami kejahatan kejam lainnya; dan pria muda juga lebih mungkin melakukan kejahatan.

4. Masalah yang paling penting.
5. Perincian masalah yang paling penting.⁴⁴

Komite keamanan lokal dan rencana keamanan masyarakat

Berbagai badan telah dibentuk untuk merencanakan, mengoordinasikan dan memantau prakarsa untuk meningkatkan keamanan lokal (lihat Kotak 9).

Di **Peru**, parlemen menciptakan National Citizen Security System (Sistem Keamanan Masyarakat Nasional) untuk mempromosikan prakarsa pencegahan kejahatan partisipatif lokal dan membuat kepolisian lebih tanggap terhadap masyarakat. Sistem ini mengandalkan lembaga-lembaga tingkat lokal, dengan pembentukan Dewan Keamanan Masyarakat Lokal (LCSC – Local Citizen Security Councils) (Consejos Distritales de Seguridad Ciudadana). Di LCSC, para komandan polisi lokal bekerja sama secara langsung dengan pemerintah setempat dan para wakil masyarakat dalam pencegahan kejahatan. LCSC dapat digambarkan sebagai mekanisme bottom-up (dari bawah ke atas) untuk meminta pertanggungjawaban polisi atas kualitas tindakan dan pelayanan mereka dan memberikan peluang penting bagi partisipasi masyarakat dalam isu-isu keamanan lokal. Mereka diberi tugas merancang suatu rencana keamanan masyarakat pada tingkat kota berdasarkan penilaian mengenai isu-isu keselamatan dan keamanan lokal. Rencana keamanan ini dilaksanakan dengan mengerahkan kerja sama dan sumber daya lokal. LCSCs juga bertanggung jawab mengevaluasi dampak rencana tersebut dan memantau kinerja para pegawai pemerintah yang melaksanakan rencana tersebut, termasuk polisi.⁴⁵

Badan-badan serupa, seperti Dewan Keamanan Lokal (Local Security Councils) (Consejos de Seguridad) telah dibentuk di Cile, Kolombia dan Guatemala. Di Kolombia, para anggota Dewan Keamanan Lokal (Local Security Council) meliputi komandan polisi dan militer lokal, wali kota dan para wakil dari sektor akademik dan swasta.

Contoh langkah-langkah untuk memadukan isu gender ke dalam prakarsa keamanan pemerintah setempat:

- Libatkan pakar gender dan para wakil dari organisasi wanita dalam komite/dewan keamanan masyarakat.
- Pastikan agar audit keselamatan masyarakat melibatkan: konsultasi dengan para wanita, pria dan kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda dengan landasan yang setara; fokus pada GBV; data yang dipisahkan menurut jenis kelamin, usia, etnis dan lingkungan pemukiman; dan pertanyaan-pertanyaan khusus mengenai kebutuhan keamanan yang berbeda dari kelompok-kelompok masyarakat yang terdapat di daerah dalam yurisdiksi pemerintah daerah. Lihat Bagian 4.6 mengenai Penilaian, Pemantauan dan Evaluasi.
- Pertimbangkan kebutuhan keamanan pria, wanita, anak lelaki dan anak perempuan yang berbeda saat menyusun dan melaksanakan prakarsa pencegah-

an dan respons kejahatan.

- Komunikasikan hasil-hasil audit keselamatan dan proses perencanaan dengan badan-badan keamanan regional dan nasional. Data ini sangat penting untuk menjamin agar kebijakan keamanan regional dan nasional menggambarkan realitas keamanan lokal, dan dalam sebagian konteks berperan sebagai mekanisme peringatan dini konflik.
- Berikan pelatihan dan pendampingan (mentoring) untuk membangun suatu pendekatan yang tanggap terhadap gender kepada pihak-pihak yang terlibat dalam merancang rencana keamanan tingkat masyarakat. Lihat Bagian 4.5 mengenai Pelatihan Gender.

4.4 Organisasi masyarakat sipil

Alasan utama keterlibatan OMS dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan keamanan adalah untuk menjamin proses yang demokratis, transparan, bertanggung jawab dan inklusif. OMS tidak otomatis mewakili prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik ini, dan dengan demikian, OMS tidak homogen dalam hal kepentingan ekonomi dan politiknya. Namun demikian, masyarakat sipil berpotensi memberikan peluang untuk membangun keahlian dan kemampuan untuk secara independen mengevaluasi, menentang atau mendukung analisis dan keputusan pemerintah mengenai masalah pertahanan dan keamanan. OMS mencakup berbagai organisasi, yang meliputi organisasi wanita, serikat pekerja, kelompok keagamaan, perhimpunan etnis atau kelompok minoritas atau masyarakat pribumi, perhimpunan bisnis profesional, organisasi advokasi, LSM, think tank (tim pakar) dan yayasan, kelompok penelitian, kelompok media dan lembaga pelatihan. Keanekaragaman ini merupakan kekuatan sekaligus kelemahan. Keanekaragaman ini merupakan kekuatan karena keanekaragaman tersebut berpotensi mewakili berbagai kelompok dalam masyarakat yang belum tentu ikut berperan dalam proses pembuatan kebijakan. Keanekaragaman ini merupakan kelemahan karena mencari landasan yang sama merupakan usaha yang sulit dan memakan waktu lama, terutama berkaitan dengan isu pembuatan kebijakan keamanan.

Lihat Tool (Alat) mengenai Pengawasan

Penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan keamanan nasional di masa lalu diliputi oleh kerahasiaan, yang sampai batas tertentu memang diperlukan karena tuntutan keamanan nasional. Namun demikian, bila proses tersebut secara kaku dianggap sebagai urusan internal pemerintah, proses tersebut akan kontra-produktif.⁴⁷ Kerahasiaan dapat menutupi mismanajemen keuangan akibat korupsi atau tidak adanya keahlian. Salah satu cara untuk menanggulangi masalah ini adalah dengan memastikan agar jenis-jenis informasi dan dokumen yang

Kotak 9 Komite keamanan lokal dan mekanisme peringatan dini di Sierra Leone⁴⁶

Di Sierra Leone, Kantor Keamanan Nasional (ONS, Office of National Security) membentuk Komite Keamanan Provinsi dan Komite Keamanan Kabupaten (Provincial Security Committees and District Security Committees) sebagai forum konsultasi tingkat lokal untuk menilai dan merespons ancaman keamanan di seluruh negeri. Komite ini juga dibentuk untuk menjamin agar kebijakan keamanan menggambarkan kebutuhan keamanan yang sesungguhnya dan mengumpulkan masukan dari tingkat masyarakat. Komite keamanan desentralistis yang berlokasi di pedesaan dapat berperan sebagai mekanisme peringatan dini konflik bagi pemerintah, karena komite tersebut melapor langsung kepada ONS.

Pelibatan para wanita atau wakil-wakil dari organisasi wanita di badan keamanan ini sejauh ini masih terbatas, tapi akan meningkatkan kemampuan mengumpulkan data sebagai bagian dari mekanisme peringatan dini. Suatu pendekatan bottom-up (dari bawah ke atas) seperti ini dapat dipadukan dengan perekrutan penasihat gender bagi ONS yang dapat menganalisis dan menyusun data yang diterima dari Komite Keamanan Provinsi dan Kabupaten, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan seperti:

1. Apakah lembaga-lembaga sektor keamanan memberikan respons yang memadai terhadap kebutuhan keamanan pria, wanita, anak perempuan dan anak lelaki?
 - a. Apakah pria dan wanita bebas meninggalkan rumah mereka atau bepergian keluar kabupaten mereka?
 - b. Apakah pria, wanita, anak perempuan dan anak lelaki rentan terhadap perdagangan manusia dan eksploitasi seksual?
 - c. Apa layanan yang tersedia bagi pria dan wanita yang menderita kekerasan dalam rumah tangga?
2. Apa jenis dan berapa tingkat kejadian GBV yang terjadi? Apakah GBV meningkat atau berkurang?
3. Apakah tersedia sumber daya yang cukup dalam masyarakat untuk merespons ancaman keamanan yang berbeda yang dialami pria dan wanita serta kelompok masyarakat yang berbeda?

dapat dan harus dirahasiakan diatur dengan jelas dalam hukum tertulis, sementara pada saat yang sama menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.⁴⁸

OMS dapat mengambil beberapa tindakan berikut untuk mendukung pembuatan kebijakan keamanan yang tanggap terhadap gender:

- **Pengaruh** kebijakan publik melalui pembelaan terhadap kebijakan dan undang-undang baru mengenai perpolisian, intelijen, pembenahan pertahanan atau keamanan nasional.
- **Ciptakan** iklim kebijakan yang kondusif dan partisipatif dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai NSP dan kebijakan keamanan, serta dimensi gendernya.
- **Sediakan** sejumlah pakar teknis yang dapat dimanfaatkan para pembuat kebijakan yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam analisis gender.
- **Dukung** penyusunan kebijakan keamanan melalui penelitian mengenai kebutuhan keamanan tingkat masyarakat, dengan membedakan kebutuhan pria, wanita, anak perempuan dan anak lelaki.
- **Pantau** pelaksanaan kebijakan keamanan dan tindakan lembaga-lembaga sektor keamanan untuk menjamin transparansi dan pertanggungjawaban publik.
- **Sampaikan** pandangan dan pilihan masyarakat sehubungan dengan keamanan – termasuk kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggirkan – yang merupakan komponen penting dari penyusunan NSP/kebijakan keamanan yang inklusif dan dapat memperluas perdebatan mengenai apa ‘keamanan’ itu.
- **Dorong** pemilikan lokal proses pembuatan kebijakan di luar lembaga negara.
- **Bangun kemampuan** staf pemerintah dan anggota

parlemen dengan membuat dan menyebarkan informasi seperti ringkasan kebijakan yang berkaitan dengan masalah dan kebutuhan keamanan tingkat masyarakat.

- **Promosikan** pengawasan publik atas penyusunan kebijakan keamanan melalui laporan media dan pembangunan kemampuan para wartawan mengenai kebijakan keamanan dan isu gender.
- **Fasilitasi** dan ikut serta dalam debat publik mengenai masalah-masalah inti pertahanan dan keamanan.
- **Rancang dan sebarkan** analisis dan informasi independen mengenai sektor keamanan kepada parlemen dan masyarakat umum.
- **Tawarkan proposal** pembangunan kemampuan kepada pemerintah, parlemen dan OMS lainnya mengenai gender dan kebijakan keamanan melalui lokakarya dan pelatihan.
- **Lakukan audit** dan penilaian gender, termasuk analisis anggaran gender, atas kebijakan keamanan dan lembaga-lembaga sektor keamanan.
- **Lakukan lobi** untuk mengadakan debat publik mengenai isu-isu keamanan dan memastikan agar informasi tertentu dapat diakses masyarakat umum.

Organisasi wanita

Organisasi wanita dan organisasi yang menangani isu gender memiliki keahlian khusus dan akses atas informasi yang membuat mereka menjadi mitra berharga bagi OMS lainnya, parlemen, lembaga-lembaga sektor keamanan dan pemerintah dalam proses menjelaskan kebijakan keamanan. Mereka sering dapat berperan sebagai penghubung penting antara realitas tingkat ketidakamanan masyarakat yang dialami pria dan wanita, dan para pembuat kebijakan di tingkat nasional, regional dan internasional. Organisasi-organisasi berfokus gender yang bekerja di tingkat masyarakat sering memiliki jaringan

tingkat akar rumput yang memungkinkan mereka mengidentifikasi kebutuhan keamanan penting kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Data ini akan sangat berarti, baik dalam proses membuat kajian sektor keamanan maupun sebagai peringatan dini konflik, yang pada gilirannya sangat penting untuk menentukan prioritas keamanan nasional.

Cara melibatkan organisasi wanita dalam perdebatan dan perumusan kebijakan keamanan meliputi:

- Fasilitasi interaksi antara kelompok-kelompok wanita dan penyedia keamanan lokal, misalnya melalui pelibatan mereka dalam komite keamanan lokal.
- Bangun kemampuan organisasi-organisasi wanita sehubungan dengan isu-isu kebijakan keamanan yang meliputi advokasi dan pengawasan.
- Libatkan para wakil dari organisasi-organisasi wanita sebagai pakar gender dalam dengar pendapat parlemen atau lakukan pelatihan gender.

OMS-OMS bisa lebih berpengaruh bila berbicara dengan satu suara. Salah satu contoh pengaruh yang dapat diberikan suatu jaringan OMS adalah Kelompok Kerja LSM untuk Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (NGO Working Group on Women, Peace and Security). Jaringan ini dibentuk pada bulan Mei 2000 oleh 11 organisasi untuk mendukung penerapan Resolusi Dewan Keamanan PBB untuk perempuan, perdamaian dan keamanan. Berkat lobi dan aktivitas intensif Kelompok Kerja ini, Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 (UN SCR 1325) diterima secara aklamasi pada tanggal 31 Oktober 2000. Sejak saat itu, fokus Kelompok Kerja LSM (NGO Working

Group) telah berubah menjadi mendukung pelaksanaan UN SCR 1325 melalui promosi perspektif gender dan penghormatan HAM dalam semua prakarsa perdamaian dan keamanan, pencegahan dan penanganan konflik, serta pembangunan perdamaian PBB dan negara-negara anggotanya.⁴⁹

4.5 Pelatihan gender

Pelatihan gender harus diberikan kepada semua aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan keamanan untuk mendukung penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang tanggap terhadap gender. Seruan pelatihan gender bisa berasal dari para pembuat kebijakan itu sendiri atau dari badan-badan pengawas seperti parlemen dan OMS. Agar efektif, pelatihan tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tugas kelompok masyarakat tertentu, berfokus pada contoh-contoh praktis, dilengkapi bahan-bahan dan sumber daya yang relevan, dan dipantau serta dievaluasi.

Lihat Tool (Alat) mengenai Pelatihan Gender bagi Personel Sektor Keamanan

Kelompok-kelompok sasaran utama untuk pelatihan gender di kalangan pembuat kebijakan keamanan meliputi:

- Staf dari kementerian yang terkait, yang meliputi

Kotak 10 Penilaian dampak gender dari kebijakan keamanan⁵²

Pada pertengahan tahun 2007 Pemerintah Jamaika menerapkan Kebijakan Keamanan Nasional komprehensif – *Towards a Secure and Prosperous Nation* (Menuju Negara yang Aman dan Makmur). Kebijakan ini didasarkan pada Buku Hijau Strategi Keamanan Nasional, yang pertama kali diajukan ke Parlemen pada bulan Januari 2006, dan selanjutnya juga didasarkan pada Buku Putih Strategi Keamanan Nasional. Buku Putih ini disusun setelah berbagai konsultasi dengan masyarakat dan para stakeholder (pihak yang berkepentingan) Jamaika, termasuk OMS. NSP tersebut disesuaikan dengan tujuan kebijakan holistik dan sektoral dari pemikiran dan prakarsa RSK saat ini, dan merupakan hasil dari kerja sama antara Pemerintah Jamaika dan para penasihat Kanada, Inggris dan Amerika Serikat.

Pada mulanya Pemerintah Jamaika berencana melakukan pengkajian ulang pertahanan. Namun demikian, segera disadari bahwa pendekatan yang lebih menyeluruh diperlukan untuk menghadapi berbagai ancaman potensial yang ada terhadap keamanan nasional, termasuk kejahatan terorganisir, kekerasan geng, masalah sosio-ekonomi dan bencana lingkungan. Konsultasi berbasis luas dilakukan, dengan melibatkan semua lembaga pemerintahan yang mungkin terkait serta lembaga-lembaga negara dan OMS, termasuk kelompok-kelompok wanita.

Hasilnya adalah kebijakan keamanan nasional yang melibatkan semua lembaga keamanan dan peradilan utama termasuk angkatan bersenjata, kepolisian, Kementerian Kehakiman dan stakeholder (pihak yang berkepentingan) bukan negara. Kebijakan ini memadukan kebijakan, tujuan dan tanggung jawab utama keamanan negara ke dalam suatu rencana induk keseluruhan untuk pelaksanaan 'Visi Nasional' Jamaika. NSP tersebut menguraikan kombinasi penggunaan instrumen politik, ekonomi, sosial, informasi dan keamanan untuk meningkatkan keamanan dan keadilan. Kebijakan tersebut menjelaskan kerangka institusi di mana angkatan bersenjata dan lembaga-lembaga sipil negara akan mengoordinasikan kegiatan mereka untuk menciptakan jaringan keamanan yang terpadu dan kohesif untuk mengamankan kepentingan nasional. Kebijakan ini juga membahas peran dan tanggung jawab sektor publik dan swasta yang saling melengkapi, dan juga OMS.

Dengan judul 'The Effects of Violence on Communities' (Dampak Kekerasan terhadap Masyarakat), NSP tersebut menyerukan perhatian lebih besar terhadap individu, masyarakat dan negara. Dalam kebijakan tersebut dikatakan, 'Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu dari bentuk kekerasan yang lebih lazim dan umum yang meresahkan masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga mempengaruhi pola umum kejahatan dan kekerasan karena dampak negatifnya terhadap struktur sosial dan perannya dalam memasyarakatkan penggunaan kekerasan di kalangan pemuda sebagai cara menyelesaikan perselisihan. Wanita dan anak-anak secara tidak sebanding berisiko mengalami kekerasan dalam rumah tangga.'

Setelah persetujuan NSP tersebut, tantangan berikutnya adalah pelaksanaannya. Sebuah National Security Strategy Implementation Unit (Satuan Pelaksanaan Strategi Keamanan Nasional) telah dibentuk, yang bekerja atas nama National Security Council (Dewan Keamanan Nasional). Satuan ini bertugas mengoordinasikan tugas kementerian-kementerian yang terkait.

kementerian pertahanan, kementerian dalam negeri, dan kementerian luar negeri.

- Para anggota Dewan Keamanan Nasional (NSC, National Security Council).
- Para anggota parlemen di komite pertahanan dan keamanan dan staf mereka.
- Para anggota dewan keamanan masyarakat lokal atau forum kepolisian masyarakat.
- OMS yang menangani kebijakan keamanan.

Berbagai aktor dapat memberikan pelatihan gender, mulai dari OMS yang memiliki keahlian khusus di daerah tersebut sampai para pakar gender pemerintah. Topik-topik potensial untuk pelatihan gender meliputi:

- Kebutuhan keamanan pria, wanita, anak lelaki dan anak perempuan yang berbeda.
- Penurunan kasus diskriminasi, pelecehan seksual dan GBV oleh personel sektor keamanan.
- Strategi penghapusan GBV.
- Kerangka legal dan normatif internasional, regional dan nasional yang menekankan hak-hak dan akses setara pria dan wanita.
- Peningkatan perekrutan, retensi dan kemajuan wanita di lembaga-lembaga sektor keamanan.
- Mekanisme untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sipil, termasuk organisasi wanita, dalam proses pembuatan kebijakan keamanan.
- Penilaian dampak kebijakan gender.
- Analisis anggaran gender.

Bersama dengan pelatihan khusus mengenai isu gender, topik-topik gender dapat dipadukan ke dalam pelatihan yang berfokus pada isu keamanan. Pilihan terakhir ini dapat menjadi pendekatan yang lebih efektif dalam memasyarakatkan pentingnya gender di kalangan aktor di sektor keamanan. Misalnya, untuk membangun kemampuan para anggota parlemen mengawasi proses pembuatan kebijakan keamanan, pelatihan mengenai analisis strategis dan perumusan kebijakan, dan juga mengenai pengawasan parlemen atas sektor keamanan, diperlukan.⁵¹

4.6 Penilaian, pemantauan dan evaluasi

Proses penilaian dan pemantauan serta evaluasi (M&E) yang komprehensif membantu menjamin agar kebijakan keamanan memenuhi kebutuhan pria, wanita, anak perempuan dan anak lelaki dan agar proses perumusan dan pelaksanaannya mencapai tujuan yang telah diidentifikasi. Isu-isu gender dapat dipadukan ke dalam kerangka penilaian dan M&E keamanan yang sudah ada, atau audit gender dan penilaian dampak khusus dapat dilakukan (atau keduanya). Proses ini harus dilakukan sebagai bagian dari proses pembuatan kebijakan keamanan resmi tapi

dapat juga digunakan sebagai tool (alat) untuk pengawasan oleh parlemen dan OMS.

Lihat Tool (Alat) mengenai Penilaian, Pemantauan dan Evaluasi RSK dan Gender

Penilaian dampak gender

Penilaian dampak gender dari kebijakan keamanan membantu menentukan dampak potensial atau dampak yang sudah ada dari kebijakan keamanan terhadap pria, wanita, anak perempuan dan anak lelaki (lihat Kotak 11). Walaupun lebih baik melakukan penilaian ketika kebijakan masih dalam bentuk rancangan dan perubahan dapat dilakukan, penilaian ini bisa juga menjadi tool (alat) yang berguna untuk menentukan apakah diperlukan revisi atas kebijakan tersebut.

Analisis gender dan sosioekonomi

Analisis gender dan sosioekonomi (GSE) yang disesuaikan bisa juga digunakan, baik dalam menyusun kebijakan keamanan maupun sebagai instrumen penting untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya. Melalui analisis gender, peran dan hubungan gender yang sudah ada dipahami dengan lebih baik, khususnya perbedaan dalam kegiatan, akses atas sumber daya dan pembuatan keputusan, dan hambatan ekonomi, sosial, politik dan hambatan lainnya yang dihadapi wanita dan pria.

Analisis GSE mempertimbangkan berbagai tantangan yang dialami ketika gender berkaitan dengan ketidaksetaraan lainnya yang dihadapi wanita dan pria seperti kelas, etnis, budaya dan agama. Karena itu, analisis GSE yang diterapkan selama penyusunan dan pelaksanaan NSP dan kebijakan keamanan lainnya dapat membantu menjamin efektivitas kebijakan tersebut bagi semua anggota suatu lembaga, negara atau masyarakat.

Kotak 12 menampilkan daftar bidang-bidang yang harus dipertimbangkan saat menilai kebutuhan keamanan.

Analisis anggaran gender

Analisis anggaran bisa menjadi instrumen efektif yang dapat digunakan lembaga-lembaga pengawasan pada tahap penyusunan serta pemantauan dan evaluasi (M&E) kebijakan keamanan. Walaupun biasanya parlemen yang memelopori seruan bagi dilakukannya analisis anggaran gender sebagai bagian dari pembukaan debat mengenai bagaimana membelanjakan pendapatan negara, OMS bisa juga memprakarsai analisis anggaran gender. Analisis anggaran gender dapat menentukan apakah pendanaan yang memadai dialokasikan untuk menangani kebutuhan dan prioritas keamanan dan keadilan pria, wanita, anak perempuan dan anak lelaki yang berbeda.

Pertanyaan-pertanyaan penting yang harus diajukan sebagai bagian dari analisis anggaran gender atas

Kotak 11 | Kebijakan Keamanan Nasional Jamaika – suatu proses yang inklusif ⁵⁰

| Langkah: | Pertanyaan yang diajukan: |
|---|--|
| Langkah 1: Definisikan isu dan sasaran | <ul style="list-style-type: none"> ■ Apa yang ingin dicapai kebijakan tersebut, dan siapa yang mendapatkan manfaatnya? ■ Apakah kebijakan tersebut memenuhi kebutuhan keamanan pria, wanita, anak lelaki dan anak perempuan yang berbeda? Apakah kebijakan tersebut menangani isu-isu GBV, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan manusia? Apakah kebijakan tersebut memasukkan langkah pencegahannya? ■ Apakah penekanannya pada keamanan nasional atau keamanan manusia? ■ Apakah kebijakan tersebut sesuai dengan mandat internasional, regional dan nasional mengenai isu gender? ■ Apakah kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender atau menghapus hambatan dan, bila demikian, apakah harus ada suatu tujuan kesetaraan gender? ■ Apakah kebijakan tersebut menggunakan bahasa yang spesifik gender dan peka terhadap gender? ■ Apa pendapat para pria dan wanita, termasuk OMS gender/wanita atau Kementerian Urusan Wanita, mengenai isu tersebut dan hasilnya? |
| Langkah 2: Kumpulkan data | <ul style="list-style-type: none"> ■ Bagaimana berkonsultasi dengan para stakeholder (pihak yang berkepentingan) dan kelompok-kelompok wanita dan pria? ■ Apakah organisasi-organisasi yang mewakili benar-benar menyampaikan suara para pria dan wanita yang diperkirakan akan mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut? Bila tidak, apa strategi untuk menjangkau mereka? ■ Bagaimana komposisi gender dari masyarakat yang terdampak oleh kebijakan tersebut? ■ Bagaimana data dan informasi statistik dikumpulkan menurut jenis kelamin, etnis, kecacatan, usia, agama dan orientasi seksual? ■ Apa informasi lain selain dari data yang dipisahkan menurut jenis kelamin yang diperlukan untuk memahami isu tersebut? ■ Apa risiko konsultasi dini – bagaimana menangani harapan dan kepentingan yang berbeda? |
| Langkah 3: Susun pilihan | <ul style="list-style-type: none"> ■ Bagaimana dampak positif atau negatif dari rekomendasi atau setiap pilihan terhadap wanita dan pria? ■ Apakah rekomendasi atau setiap pilihan mendukung atau menentang persepsi tradisional atau terstéréotip mengenai wanita dan pria? ■ Pilihan mana yang memberi pilihan nyata dan peluang bagi pria dan wanita untuk mencapai potensi penuh mereka dalam masyarakat? ■ Apakah ada keharusan untuk mempertimbangkan langkah peredaan bila akan timbul dampak negatif terhadap salah satu kelompok masyarakat, dan apa tindakan yang dapat diambil untuk mengurangi dampak tersebut atau untuk menciptakan suatu kebijakan yang lebih seimbang gender? |
| Langkah 4: Komunikasikan | <ul style="list-style-type: none"> ■ Pesan apa yang perlu dikomunikasikan? ■ Bagaimana pesan tersebut akan menjangkau kelompok-kelompok wanita dan pria yang berbeda? ■ Apakah pendekatan yang terpisah diperlukan? ■ Bagaimana kebijakan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah terhadap kesetaraan dan apakah pesan khusus mengenai kesetaraan harus dimasukkan dalam kebijakan tersebut? ■ Apakah bahasa, simbol dan contoh yang peka terhadap gender digunakan dalam bahan-bahan yang mengkomunikasikan kebijakan tersebut? ■ Bagaimana Anda akan berkomunikasi dengan para wanita dan pria yang menggunakan bahasa lain atau yang buta huruf? |
| Langkah 5: Laksanakan | <ul style="list-style-type: none"> ■ Apakah kebijakan atau layanan tersebut akan dialami atau diakses dengan cara yang berbeda oleh wanita atau pria, dan apakah perbedaan tersebut akan dipengaruhi oleh etnis, kecacatan, usia, agama atau orientasi seksual? Rencana apa yang diterapkan untuk menjangkau mereka yang mungkin terpinggirkan? ■ Apakah layanan tersebut dapat diberikan bersama – yaitu, apakah departemen pemerintah lainnya, organisasi-organisasi lokal, nasional dan internasional dapat membantu memberikan layanan tersebut kepada para wanita dan pria yang menjadi sasaran? ■ Apakah pihak-pihak yang melaksanakan/memberikan kebijakan atau layanan tersebut mewakili keanekaragaman masyarakat yang dilayaninya? Apakah para wanita dilibatkan juga dalam pelaksanaannya? ■ Apakah sumber daya (keuangan dan manusia) khusus dan memadai telah dialokasikan untuk memungkinkan pencapaian tujuan kesetaraan gender? ■ Apakah para pelaksana tanggap terhadap gender dan memahami isu-isu khusus gender? |

| | |
|--------------------------------|--|
| <p>Langkah 6: Pantau</p> | <ul style="list-style-type: none"> ■ Apakah penerima manfaat wanita dan pria sama-sama berpartisipasi dalam proses pemantauan? ■ Apakah persyaratan pemantauan mencakup langkah untuk mencapai kesetaraan gender, langkah untuk mencapai kepuasan pelanggan dan apakah persyaratan tersebut mengungkapkan sampai sejauh mana kebijakan tersebut berhasil menangani kebutuhan wanita dan pria yang berbeda? ■ Bagaimana organisasi-organisasi eksternal yang mewakili kelompok yang berbeda dalam masyarakat dapat membantu memantau hasil kebijakan tersebut? ■ Apakah ada langkah-langkah yang diambil untuk memprakarsai penyelidikan atau untuk mengubah kebijakan tersebut bila kebijakan tersebut tidak mencapai tujuan kesetaraan gender yang didefinisikan pada permulaan proyek atau kesetaraan peluang bagi wanita atau pria? |
| <p>Langkah 7: Evaluasi</p> | <ul style="list-style-type: none"> ■ Apakah kebijakan tersebut mempromosikan dan mencapai kesetaraan peluang bagi wanita dan pria? Apakah tujuan untuk wanita dan pria telah tercapai? ■ Apakah salah satu kelompok mendapatkan manfaat yang lebih besar daripada kelompok yang lain – kalau demikian, bagaimana menangani ketidakseimbangan tersebut? Apakah masukan dialokasikan secara adil? ■ Apa dampak umumnya terhadap status dan taraf hidup wanita dan pria? ■ Apakah proses tersebut melibatkan wanita dan pria? Apakah proses tersebut meminta dan menghargai pandangan mereka secara setara? ■ Apakah ada kebutuhan pengumpulan data tambahan dan apakah sasaran dan indikator harus disesuaikan dengan pengalaman? ■ Pelajaran apa yang didapat untuk memperbaiki kebijakan dan layanan di masa yang akan datang, siapa yang perlu diberi tahu dan bagaimana menyampaikan informasi tersebut? |

Kotak 12 Teknik penilaian gender dan sosio-ekonomi untuk kebijakan keamanan⁵³

| | |
|---------------------------------------|--|
| <p>Data statistik yang dipisahkan</p> | <p>Pengumpulan dan analisis data menurut kategori (misalnya, jenis kelamin dan etnis) untuk mengidentifikasi kesenjangan keamanan/sosio-ekonomi dan pola diskriminasi dalam situasi tertentu, seperti kesenjangan wanita dan pria, atau antara wanita dan pria dari etnis yang berbeda. Data ini akan membantu mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas keamanan kelompok yang berbeda dalam masyarakat, dan membantu menentukan fokus kebijakan keamanan.</p> |
| <p>Penilaian kebutuhan praktis</p> | <p>Pengukuran kebutuhan keamanan mendesak wanita dan pria yang muncul akibat status mereka dalam masyarakat.</p> |
| <p>Penilaian kebutuhan strategis</p> | <p>Evaluasi kebutuhan wanita dan pria yang lebih umum, termasuk risiko ketidakamanan yang berkaitan dengan perundangan-undangan yang tidak memadai atau kurangnya peluang kerja.</p> |

kebijakan keamanan:

1. Sampai sejauh mana alokasi umum memberikan keamanan yang setara bagi wanita, pria, anak lelaki dan anak perempuan?
2. Sampai sejauh mana anggaran tersebut menetapkan dana untuk wanita, pria, anak perempuan atau anak lelaki? (Misalnya, melalui penyediaan dana (earmarking) untuk program pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yang menargetkan pria, atau dukungan bagi para penyintas perempuan dari perdagangan manusia.) Apakah alokasi sumber daya cukup untuk pelaksanaan yang efektif?
3. Sampai sejauh mana anggaran tersebut menetapkan kegiatan, masukan dan biaya yang berkaitan dengan gender? (Misalnya, melalui penyediaan dana untuk pelatihan gender atau jabatan staf penghubung gender.)

4. Sampai sejauh mana spesialis/penasihat gender dan organisasi wanita berpartisipasi pada tahap-tahap dalam putaran anggaran (misalnya, persiapan, audit)?⁵⁴

Berdasarkan analisis anggaran, badan-badan pengawas dapat memberikan masukan dalam diskusi dengan:

- Mengadakan debat di media.
- Menerbitkan buku kerangka anggaran.
- Menyediakan laporan bagi para anggota parlemen, terutama anggota parlemen yang menjadi anggota komite pertahanan, keamanan dan anggaran.
- Memberikan bantuan teknis kepada para anggota parlemen dalam menganalisis alokasi yang diusulkan untuk sektor keamanan. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan atau melalui kegiatan advokasi OMS.

5 Memadukan gender ke dalam kebijakan keamanan dalam konteks khusus

Bagian ini menguraikan beberapa cara utama untuk memadukan gender ke dalam pembuatan kebijakan keamanan nasional di negara-negara pasca-konflik, negara-negara berkembang, negara-negara yang masih dalam masa transisi dan negara-negara maju. Namun demikian, harus diingat bahwa tidak ada model 'yang berlaku untuk semua' ('one size fits all') untuk membuat kebijakan keamanan dalam konteks yang berbeda. Kondisi setiap negara mempengaruhi konteks keamanan dan proses pembuatan kebijakannya, dan bila konteks politik, ekonomi dan sosial khusus tidak dipertimbangkan, kebijakan mungkin akan gagal (lihat Tabel 1).

Aktor eksternal utama Aktor pembangunan/keuangan: lembaga donor multilateral (misalnya, OECD, UNDP, Bank Dunia); lembaga donor bilateral; aktor bukan negara. Aktor keamanan: internasional (misalnya, EU, NATO, OSCE); pemerintah; aktor bukan negara (misalnya, LSM internasional, agen militer swasta). Aktor keamanan: pasukan intervensi; pasukan pemelihara perdamaian di bawah bantuan internasional; aktor bukan negara (misalnya, agen militer swasta). Biasanya tidak ada.

5.1 Negara-negara pasca-konflik

Di banyak negara yang terdampak konflik, pada mulanya para aktor dan lembaga yang diperlukan untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan keamanan mungkin tidak ada. Sektor keamanan, khususnya angkatan bersenjata, sering memiliki kekuasaan melebihi undang-undang. Bukannya melayani penduduk, para aktor sektor keamanan sering digunakan oleh negara untuk menindas segala bentuk penentangan dan meningkatkan militerisasi masyarakat. Di sebagian negara, militer yang kuat membuat pemerintahan sipil jadi tidak stabil. Di negara lainnya, sektor keamanan mendapat alokasi anggaran nasional yang tidak memadai, sehingga mengalihkan sumber daya pembangunan menjadi pengeluaran militer. Dalam keadaan seperti ini besar kemungkinan penentangan terhadap pembenahan sangat kuat.

Dalam pembangunan kembali dan transformasi suatu negara pasca-konflik, RSK menjadi prioritas utama. Kebijakan keamanan akan menjadi landasan penting bagi strukturisasi proses ini. Misalnya, strategi keamanan nasional telah dan tetap menjadi landasan dalam proses RSK di Sierra Leone. Walaupun banyak waktu dan sumber daya yang biasanya diperlukan agar pembenahan berakar kuat, konteks pasca-konflik memberikan peluang untuk merundingkan kembali peran dan tanggung jawab aktor negara dan bukan

negara melalui proses pembuatan kebijakan.

Tantangan dalam memadukan isu gender meliputi:

- Lembaga dan infrastruktur negara mungkin sudah runtuh atau sangat lemah. Karena itu, kemampuan dan sumber daya keuangan mungkin terbatas untuk melakukan proses konsultasi, sehingga menghambat usaha memasukkan perspektif gender dalam pembuatan kebijakan.
- Tingkat pendidikan yang umumnya rendah dan kurangnya keahlian teknis menjadi penghambat keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, sehingga berdampak terhadap para wanita dan kelompok etnis tertentu khususnya.
- Lembaga eksekutif dan lembaga keamanan sering menganggap OMS sebagai lawan politik, dan karena itu enggan bekerja sama dengan mereka, sehingga menimbulkan hambatan terhadap usaha memasukkan perspektif dari kelompok-kelompok wanita, misalnya.
- Mungkin timbul penentangan di kalangan personel di lembaga-lembaga sektor keamanan yang sedang dibangun kembali, di lembaga eksekutif, dan di kalangan politisi secara umum terhadap usaha memusatkan perhatian pada gender dalam pembuatan kebijakan bila terjadi kekurangan sumber daya pokok dan timbul persepsi bahwa isu yang lebih mendesak harus ditangani.
- Bila bekerja di negara yang sangat miskin, perlu dipastikan agar prakarsa gender yang diamanatkan dalam perundang-undangan dan kebijakan berkelanjutan dan masuk akal secara finansial.
- Perundang-undangan dan kebijakan sering tidak dilaksanakan setelah dibuat (khususnya bila didorong oleh aktor-aktor eksternal).

Kiat/rekomendasi pemaduan gender ke dalam pembuatan kebijakan keamanan di negara-negara pasca-konflik

- Perjanjian perdamaian: Bila RSK disebutkan dalam suatu perjanjian perdamaian, rujukan yang jelas harus dibuat mengenai maksud perancangan suatu NSP yang tanggap terhadap gender.
- Dialog nasional: Dalam konteks pasca-konflik di mana tidak ada visi keamanan yang satu yang dapat menjadi landasan NSP, memulai suatu dialog nasional yang komprehensif mengenai keamanan yang melibatkan fokus pada isu-isu gender akan sangat bermanfaat.
- Konsultasi pedesaan: Perbedaan desa-kota di negara-negara pasca-konflik biasanya cukup besar, dan keterlibatan serta kebutuhan pria dan wanita di luar ibu kota perlu perhatian khusus.
- Komitmen: Dukungan lembaga donor atas penyusunan kebijakan keamanan yang inklusif sangat penting karena sumber daya yang biasanya kurang dalam konteks pasca-konflik. Penyusunan dan publikasi kebijakan keamanan yang tanggap terhadap gender akan membantu pemerintah yang sedang berkuasa menunjukkan komitmen politik

| Tabel 1 Kontekstualisasi pembuatan kebijakan keamanan dalam RSK ⁵⁵ | | | | |
|---|---|---|--|---|
| | Negara berkembang | Negara masa transisi | Negara pasca-konflik | Negara maju |
| Kriteria utama | Tingkat perkembangan ekonomi. | Sifat sistem politik. | Situasi keamanan khusus. | Kemauan politik. |
| Tantangan utama | Kurangnya pembangunan. Belanja militer yang berlebihan; sektor keamanan yang kurang dikelola/ditata dengan baik menyebabkan penyediaan keamanan yang tidak efektif, sehingga sumber daya langka tidak digunakan untuk pembangunan. | Kurangnya demokrasi. Kompleks industri militer terlalu besar dan terlalu banyak menghabiskan sumber daya; negara kuat, tapi lembaga masyarakat sipil lemah; kelemahan dalam pelaksanaan RSK. | Kurangnya keamanan dan demokrasi. Lembaga pemerintah dan masyarakat sipil runtuh; penduduk terusir dari kampung halamannya; privatisasi keamanan; mungkin terdapat kantong-kantong perlawanan bersenjata; melimpahnya senjata kecil dan ranjau anti-personel. | Kemauan politik. Kadang-kadang angkatan bersenjata relatif terlalu besar dan terlalu banyak menghabiskan sumber daya. |
| Kemungkinan melakukan RSK | Bermacam-macam (tergantung pada komitmen politik terhadap pembenahan, kekuatan lembaga negara, peran dan keadaan pasukan keamanan, lingkungan keamanan regional, pendekatan lembaga donor terhadap RSK, dll.). | Cukup baik (lembaga negara kuat, pasukan keamanan profesional, proses demokratisasi yang lebih menyeluruh), bahkan lebih baik bila tersedia insentif eksternal (misalnya, penerimaan sebagai anggota EU atau NATO). | Cukup rendah (lembaga negara lemah dan saling bertentangan, privatisasi keamanan, ketergantungan pada pasukan pendukung/intervensi perdamaian). | Bermacam-macam (tergantung pada komitmen politik terhadap pembenahan, dan kekuatan relatif kompleks industri-militer); lembaga negara dan masyarakat OMS kuat, tapi hubungan di antara keduanya tidak erat. |
| Proses pembenahan umum | Transisi dari negara yang ekonominya masih terbelakang menuju negara yang ekonominya maju. | Transisi dari sistem otoriter ke sistem demokrasi. | Transisi dari konflik yang kejam menuju perdamaian. | Respons terhadap perubahan di lingkungan keamanan. |
| Sifat keterlibatan eksternal | Bantuan pembangunan disertai dengan syarat politik. | Penerimaan sebagai anggota lembaga multilateral sebagai insentif pembenahan. | Intervensi/pendudukan militer; umumnya operasi dukungan perdamaian pimpinan PBB. | Biasanya tidak ada. |
| Aktor eksternal utama | Aktor pembangunan/keuangan: lembaga donor multilateral (misalnya, OECD, UNDP, Bank Dunia); lembaga donor bilateral; aktor bukan negara. | Aktor keamanan: internasional (misalnya, EU, NATO, OSCE); pemerintah; aktor bukan negara (misalnya, LSM internasional, agen militer swasta). | Aktor keamanan: pasukan intervensi; pasukan pemelihara perdamaian di bawah bantuan internasional; aktor bukan negara (misalnya, agen militer swasta). | Biasanya tidak ada. |

untuk menangani isu-isu keamanan dan keadilan dalam konteks pasca-konflik.

- **Pemilikan lokal:** Walaupun pemilikan lokal telah menjadi istilah umum, istilah ini masih sama dengan legitimasi dan keberlanjutan jangka panjang kebijakan yang sedang disusun. NSP yang peka terhadap gender hanya mungkin dihasilkan bila

dibentuk, didorong dan dilaksanakan oleh para aktor lokal, baik pria maupun wanita.

- **Mengakui GBV dalam pembuatan kebijakan:** Dalam banyak konflik, GBV digunakan sebagai strategi terhadap orang sipil, dan akibat dari konflik adalah meningkatnya kasus GBV, misalnya dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Pria dan wanita

perlu berpartisipasi dengan landasan yang setara dalam mendefinisikan kebutuhan keamanan mereka sendiri dalam proses pembuatan kebijakan.

- Wanita yang memegang jabatan resmi: Tingkatkan partisipasi wanita dengan mendukung pengangkatan wanita untuk jabatan tingkat atas atau dengan menetapkan target atau kuota strategis. Perkuat juga kemampuan wanita yang memegang jabatan resmi untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai isu keamanan dan menjamin agar mereka memadukan isu-isu gender dan bertemu dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil.

5.2 Negara-negara dalam masa transisi dan negara-negara berkembang

Negara-negara yang masih dalam masa transisi dan negara-negara berkembang menerapkan berbagai bentuk pemerintahan yang sangat berbeda dalam kemampuan sosio-ekonomi, teknik dan sumber daya manusia. Misalnya, walalupun Bulgaria dan Ukraina telah menyusun NSP, hal ini belum terjadi di banyak negara berkembang. Sedangkan, negara-negara yang masih dalam masa transisi dan negara-negara berkembang menghadapi tantangan dan isu tertentu yang serupa dalam menyusun kebijakan keamanan yang meliputi:

- Kurangnya keahlian – dan kadang-kadang keterpaduan politik dan sosial – untuk menangani masalah organisasi, manajemen, perencanaan, keuangan dan kebijakan.
- Korupsi
- Tantangan regulasi perusahaan-perusahaan

keamanan swasta

Negara-negara dalam masa transisi

Di sebagian negara demokrasi yang masih dalam masa transisi, yang kadang-kadang dinamakan negara-negara pasca-otoriter, kemampuan teknis untuk melakukan RSK mungkin signifikan, dan prioritas utamanya adalah membangun struktur pemerintahan yang bertanggung jawab, sah dan transparan sehubungan dengan penyediaan keadilan. Tantangan mungkin tetap ada, seperti warisan sistem otoriter, rezim kriminal dan/atau korup, dan oknum aparat keamanan yang tidak bertanggung jawab. Atau mungkin terjadi penentangan birokratis yang kuat terhadap usaha membangun pengawasan pemerintah dan parlemen atas para aktor keamanan, dan mengizinkan OMS memainkan peran pengawasan. Di banyak negara bekas Uni Soviet serta Eropa Timur dan Tengah, isu etnis memainkan peran penting di lembaga-lembaga keamanan. Karena itu, sebagian besar kebijakan mungkin harus diubah serentak; perubahan ini mungkin merupakan perubahan besar.

Dalam konteks Euro-Atlantik, insentif keanggotaan EU dan NATO memainkan peran penting dalam membuka sistem politik bagi penyelidikan eksternal. NATO memberikan perhatian besar pada lingkungan keamanan eksternal, termasuk pembenahan angkatan bersenjata dan pertahanan. Pada gilirannya, EU memusatkan perhatian pada berbagai aspek dari RSK internal, termasuk perpolisian dan manajemen perbatasan, dan memainkan peran penting dalam memperluas perdebatan mengenai RSK.

Negara-negara berkembang

Seperti di negara-negara yang masih dalam masa

Kotak 13 Kelompok-kelompok wanita di negara-negara yang rapuh pasca-konflik⁵⁶

Dalam sebuah laporan yang dibuat oleh Jaringan Komite Bantuan Pembangunan untuk Konflik, Perdamaian dan Kerja Sama Pembangunan (Development Assistance Committee Network on Conflict, Peace and Development Cooperation) OECD, dikatakan bahwa kelompok-kelompok wanita memperlihatkan fleksibilitas yang nyata dalam menghadapi situasi yang berubah dan memburuk. Di Nepal, para penyedia keadilan informal, yang umumnya pria, terusir dari kampung halamannya akibat konflik dan dalam banyak kasus digantikan oleh kelompok-kelompok wanita. Dalam kasus Guatemala dan Somalia, para wanita memelopori gerakan perdamaian. Hal ini juga terjadi dalam kasus Mano River Union (Guinea, Liberia dan Sierra Leone) di mana sebuah jaringan sub-regional wanita berhasil mendorong terlaksananya pembicaraan trilateral di antara para presiden ketiga negara tersebut. Jaringan ini juga berhasil melobi para perunding perdamaian untuk menjamin pemasukan isu-isu wanita dalam persetujuan perdamaian Liberia.

Anehnya, lingkungan yang memburuk dapat memberikan peluang khas bagi lembaga donor – dan para aktor negara betapa pun rapuhnya – untuk memperkuat hak-hak wanita dengan mendukung partisipasi mereka di lembaga-lembaga peradilan bukan negara. Laporan tersebut selanjutnya menyatakan bahwa usaha-usaha harus dilakukan untuk mendorong pencatatan dan pendaftaran persengketaan yang ditangani dalam sistem peradilan bukan negara karena para wanita dalam konteks ini nampaknya lebih teliti daripada pria dalam membuat catatan. Dalam jangka pendek sampai menengah, ini akan menjadi langkah pertama yang sangat penting dalam menciptakan hubungan antara sistem bukan negara dan sistem negara.

Karena alasan bahwa kelompok-kelompok wanita akhirnya memainkan peran penting dalam penyediaan keadilan selama dan segera setelah berakhirnya konflik, pandangan dan pengalaman mereka perlu dipertimbangkan saat/bila menyusun suatu rencana keamanan nasional.

transisi, terdapat tantangan signifikan dalam sistem politik negara-negara berkembang, yang meliputi warisan pemerintahan militer atau otoriter, dan penentangan birokratis yang kuat terhadap usaha membangun pengawasan pemerintah dan parlemen. Selain itu, OMS jarang dianggap sebagai mitra, tapi lebih dianggap sebagai kelompok oposisi bagi negara.

Karena peran tertentu lembaga-lembaga negara di banyak negara berkembang, pemilikan lokal proses pembenahan sangat penting. Pembuatan kebijakan yang didorong oleh lembaga-lembaga donor akhirnya dapat menghambat pemilikan proses tersebut oleh pemerintah penduduk penerima. Hal ini sering terjadi bila penerimaan bantuan disyaratkan dengan pencapaian tahap pembenahan tertentu atau pengumuman kebijakan yang akan dilaksanakan oleh berbagai lembaga. Meskipun begitu, lembaga-lembaga donor memainkan peran penting dalam memberikan saran mengenai bagaimana menjamin partisipasi semua kelompok masyarakat yang terdampak oleh kebijakan tersebut dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam konteks ini, gender dapat dipromosikan sebagai komponen utama dalam proses pembuatan kebijakan.

Di banyak negara berkembang, sebagaimana dalam konteks pasca-konflik, para aktor bukan negara merupakan penyedia utama keamanan dan keadilan, dan berhubungan dengan sistem negara formal. Ini bisa meliputi pengadilan tradisional, layanan paralegal dan satuan-satuan pertahanan lokal. Pembuatan kebijakan keamanan harus menekankan bagaimana mengelola kekuasaan, bagaimana memberikan layanan, dan apa legitimasinya di mata pria dan wanita.

Tantangan dalam memadukan isu gender di negara-negara transisi dan negara-negara berkembang meliputi:

- Di negara-negara yang masih dalam masa transisi, para elit yang berkuasa sering merupakan orang-orang yang berkuasa pada masa pemerintahan otoriter, dan karena itu mungkin menjadi kelompok yang paling menentang perubahan.
- Peran sah OMS untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan keamanan mungkin ditentang, yang dapat menimbulkan hambatan bagi pemasukan perspektif gender, dan perbedaan di antara kebutuhan yang berbeda dari kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
- Lembaga-lembaga donor yang tidak mempertimbangkan gender dalam saran yang mereka berikan kepada negara-negara berkembang mungkin tanpa disadari semakin memperkuat pengabaian perspektif gender dalam proses pembuatan kebijakan.

Kiat/rekomendasi dalam memadukan gender ke dalam pembuatan kebijakan keamanan di negara-negara transisi dan negara-negara berkembang:

Pembangunan kemampuan: Di negara-negara yang masih dalam masa transisi dan negara-negara berkembang, lembaga-lembaga negara mungkin sudah ada, tapi transformasinya menuju lembaga-

lembaga yang bertanggung jawab dan demokratis merupakan usaha yang sulit dan memerlukan waktu lama. Transformasi ini memerlukan komitmen lembaga eksekutif dan, dalam sebagian kasus, dukungan dari masyarakat internasional. Pembangunan kemampuan mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan gender harus berlangsung di berbagai tingkat:

- Eksekutif: Pastikan agar para pejabat senior seperti Kepala Negara dan para menteri menyadari kebijakan dan komitmen internasional dan nasional berkaitan dengan kesetaraan gender dan HAM. Para aktor eksternal yang terpercaya dapat membantu.
- Parlemen: Komite-komite parlemen di negara-negara yang masih dalam masa transisi dan negara-negara berkembang kekurangan keahlian berkaitan dengan masalah teknis isu keamanan dan pertahanan serta anggaran militer, apalagi bagaimana hubungannya dengan isu-isu gender.
- Masyarakat sipil: Di negara-negara yang masih dalam masa transisi dan negara-negara berkembang di mana lembaga politiknya lemah dan sektor keamanan kuat, para politisi di lembaga eksekutif dan parlemen mungkin mengandalkan dukungan eksplisit atau implisit badan-badan keamanan. Karena itu, mereka mungkin menghindari pembenahan yang substansial karena khawatir akan menimbulkan kudeta. Karena itu, dalam jangka pendek sampai jangka menengah, pembangunan kemampuan OMS untuk mengawasi tindakan para aktor keamanan dan sensitivitas mereka terhadap masalah gender dapat menjadi mekanisme pengawasan yang paling efisien. Sebagai bagian dari badan pengawasan atas sektor keamanan, walaupun OMS kurang memahami masalah-masalah teknis yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, mereka masih dapat memainkan peran penting berkaitan dengan keterwakilan para pria dan wanita biasa.

5.3 Negara-negara maju

Negara-negara maju seperti Inggris dan Amerika Serikat semakin berpandangan bahwa ancaman paling langsung terhadap keamanan nasional mereka merupakan masalah yang dapat dipisahkan dari kesejahteraan dan stabilitas masyarakat, seperti yang tergambar pada NSP mereka dan kebijakan keamanan lainnya. Namun demikian, keamanan nasional tetap berkisar pada masalah makro-politik/ keamanan. Amerika Serikat mendefinisikan ancaman keamanan nasionalnya sebagai pengembangan dan penyebaran senjata pemusnah massal, penggunaan peluru kendali melawan Amerika Serikat, dan bencana alam. Begitu pula, masalah keamanan nasional utama bagi Inggris secara umum diidentifikasi sebagai terorisme, spionase, dampak negara-negara yang lemah terhadap stabilitas global, dan penyebaran senjata pemusnah massal. Mungkin sulit untuk melihat dimensi gender dari masalah keamanan nasional pada tingkat ini.

Pada saat yang sama, pendekatan bergender yang lebih baik dalam penyusunan prioritas keamanan nasional di negara-negara maju akan memperluas perdebatan mengenai apa itu keamanan nasional, dan yang lebih penting, apa mekanisme respons yang harus ditetapkan. Sebagaimana yang terjadi sekarang ini, pria terlalu terwakili di kepolisian, militer, pengawal perbatasan, lembaga peradilan, pemerintahan dan lembaga-lembaga sektor keamanan serta badan-badan pengawasan lainnya di negara-negara maju. Keterwakilan wanita yang lebih besar di lembaga-lembaga yang memberikan keamanan dan/atau lembaga-lembaga yang mengatur lembaga-lembaga ini dapat mempengaruhi pengertian penyediaan keamanan di negara-negara maju, dan dengan demikian juga mempengaruhi proses pembuatan kebijakan.

Begitu pula, negara-negara maju – termasuk Inggris dan Amerika Serikat – berada di garis depan dalam memberikan saran dan keahlian teknis kepada negara-negara yang sedang mengalami RSK, termasuk mengenai NSP dan proses pembuatan kebijakan keamanan. Peningkatan keahlian gender dalam tim RSK lembaga donor dapat meningkatkan responsivitas gender dukungan dan saran mengenai perumusan kebijakan keamanan.

Tantangan dalam memadukan isu gender meliputi:

- Kecenderungan memusatkan perhatian pada ancaman eksternal dan makro-politik terhadap negara sering dipertahankan dengan mengabaikan ancaman keamanan internal, yang menimbulkan dampak berbeda terhadap kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
- Keengganan untuk secara aktif memasukkan perspektif gender di negara-negara di mana lembaga eksekutif – dan penduduk secara umum – beranggapan bahwa kesetaraan gender sudah tercapai.

Kiat/rekomendasi dalam memadukan gender dalam pembuatan kebijakan keamanan di negara-negara maju:

- Perluas perdebatan mengenai apa itu keamanan nasional: buka peluang bagi partisipasi masyarakat dalam mendefinisikan kebutuhan keamanan nasional. Ini merupakan hal yang perlu dipertimbangkan lembaga eksekutif dan didukung oleh badan-badan pengawasan.
- Debat kebijakan yang inklusif: peralatan teknologi yang berfungsi dengan baik dan tingkat pendidikan yang tinggi menjamin berbagai golongan masyarakat dapat berpartisipasi dalam perdebatan mengenai keamanan dan pertahanan. Dengan demikian, peluang gender dapat dipastikan, yang memerlukan kemauan di pihak lembaga eksekutif dan parlemen, dan kampanye dukungan oleh OMS.
- Penyusunan kebijakan yang inklusif: negara-negara maju biasanya ditandai oleh masyarakat sipil yang aktif, yang meliputi kegiatan tim pakar, akademisi dan LSM. Namun demikian, biasanya pembuatan kebijakan pemerintah pusat hanya secara selektif meminta saran dari 'pihak luar'. Dengar pendapat

publik akan membuat proses pembuatan kebijakan menjadi inklusif, dan merupakan titik mula bagi isu-isu gender.

- Gender sebagai komponen utama bantuan RSK: kemampuan besar di negara-negara maju untuk membantu pemerintah lain dalam RSK dan pembuatan kebijakan yang sesuai harus melibatkan para pakar dan penasihat gender.

6 Rekomendasi pokok

1. Prakarsai **dialog nasional konsultatif dan partisipatif** mengenai isu-isu keamanan saat kebijakan keamanan tingkat nasional sedang diubah atau dirancang.
2. Lakukan **penilaian yang tanggap terhadap gender atas kebutuhan keamanan tingkat nasional dan lokal**, termasuk kebutuhan dan sumber daya keamanan pria, wanita, anak perempuan dan anak lelaki yang berbeda.
3. Gunakan **pendekatan yang komprehensif terhadap keamanan nasional** berkaitan dengan kebijakan keamanan, yang meliputi ancaman keamanan eksternal dan internal, seperti GBV.
4. Bangun **kemampuan dan komitmen gender para pembuat kebijakan keamanan** di lembaga eksekutif, kementerian, parlemen dan partai politik melalui pelatihan, pendampingan (mentoring), distribusi informasi dan lobi gender.
5. Pastikan **pengangkatan dan promosi setara pria dan wanita** untuk lembaga-lembaga pembuat keputusan keamanan seperti Dewan Keamanan Nasional, dan juga untuk jabatan-jabatan tingkat senior di kementerian dan lembaga sektor keamanan.
6. Libatkan **pakar gender** di lembaga-lembaga pembuat keputusan keamanan, misalnya melalui perwakilan kaukus anggota parlemen wanita atau kementerian yang bertanggung jawab atas isu-isu wanita dan gender.
7. Bentuk **badan-badan keamanan partisipatif lokal** untuk memberikan informasi bagi pembuatan kebijakan keamanan tingkat nasional dan menjamin pelaksanaan kebijakan keamanan nasional tingkat lokal melalui audit, rencana dan kegiatan keamanan yang terkoordinasi.
8. **Alokasikan sumber daya yang memadai**, sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan keamanan nasional, untuk mencegah, merespons dan menjatuhkan hukuman secara efektif terhadap ketidakamanan khusus yang dihadapi wanita, pria, anak lelaki dan anak perempuan dan mendanai prakarsa spesifik gender seperti pelatihan gender.
9. Lakukan **pemantauan dan penilaian yang tanggap terhadap gender** atas kebijakan keamanan nasional, termasuk melalui penilaian dampak gender atas kebijakan keamanan dan analisis anggaran gender.
10. Tentukan **mekanisme untuk peningkatan partisipasi organisasi masyarakat sipil**, termasuk organisasi wanita, dalam berbagai pertemuan seperti dengar pendapat parlemen dan konsultasi yang diadakan Dewan Keamanan Nasional.
11. **Bangun kemampuan organisasi masyarakat sipil** untuk berpartisipasi secara efektif dalam

proses pembuatan kebijakan keamanan, termasuk membangun kemampuan teknis organisasi wanita.

12. Kembangkan **jaringan organisasi masyarakat sipil**, termasuk organisasi wanita, dengan menangani isu-isu yang berkaitan dengan keamanan untuk menjamin pemasukan strategisnya ke dalam pembuatan kebijakan keamanan nasional.

7 Sumber daya tambahan

Contoh kebijakan keamanan nasional

National Security Policy for **Jamaica** (Kebijakan Keamanan Nasional **Jamaika**) – Towards a Secure and Prosperous Nation (Menuju Negara yang aman dan Makmur).
http://www.cabinet.gov.jm/docs/pdf/NSS_DOCS/nspanet.pdf

South Africa's White Paper on National Defence for the Republic of South Africa (Buku Putih **Afrika Selatan** mengenai Pertahanan Nasional Republik Afrika Selatan) – Defence in a Democracy (Pertahanan di sebuah Negara Demokrasi).
<http://www.info.gov.za/whitepapers/1995/defence.htm>

South Africa's White Paper on Safety and Security (Buku Putih Keselamatan dan Keamanan Afrika Selatan).
<http://www.info.gov.za/whitepapers/1998/safety.htm>

Romania's National Security Strategy (Strategi Keamanan Nasional **Romania**).
<http://merln.ndu.edu/whitepapers/RomaniaNationalSecurity.pdf>

Doctrine of the Armed Forces of the **Slovak Republic** (Doktrin Angkatan Bersenjata Republik Slowakia).
<http://www.arabparliaments.org/publications/legislature/2007/montreux/slovak-e.pdf>

Ireland's White Paper on Defence (Buku Putih Pertahanan **Irlandia**).
<http://www.statehouse-sl.org/policies/defence-white-paper.htm>

Sierra Leone's Defence White Paper (Buku Putih Pertahanan **Sierra Leone**).
<http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.pdf>

The **Uganda** Defence Review – Learning from Experience (Pengkajian Ulang Pertahanan **Uganda** – Pelajaran dari Pengalaman).
<http://www.ssrnetwork.net/documents/Publications/UDR/Uganda%20Defence%20-%20Learning%20From%20Experience.pdf>

The **US** National Security Strategy (Strategi Keamanan Nasional **Amerika Serikat**).
<http://www.whitehouse.gov/nsc/nss/2006/>

Panduan praktis dan buku pedoman

Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan), **OECD DAC Handbook on Security System Reform: supporting security and justice (Buku Pedoman OECD DAC tentang Pembinaan Sistem Keamanan: mendukung keamanan dan keadilan)**, Paris: OECD DAC, 2007.
<http://www.oecd.org/dataoecd/43/25/38406485.pdf>

Luethold, A., **Developing A National Security Policy (Menyusun Kebijakan Keamanan Nasional)**, Presentation (Presentasi), 2007.
<http://www.arabparliaments.org/publications/legislature/2007/montreux/leuthold-e.pdf>

South Africa's Department of Community Safety (Departemen Keselamatan Masyarakat Afrika Selatan), **Community Police Forum Toolkit (Toolkit [Paket] Forum Kepolisian Masyarakat)**, 2003.
http://www.capecgateway.gov.za/eng/pubs/public_info/C/32970

Valasek, K. bersama Nelson, K., **Securing Equality, Engendering Peace: A Guide to Policy and Planning on Women, Peace and Security (Mencapai Kesetaraan, Mewujudkan Perdamaian: Panduan Kebijakan dan Perencanaan mengenai Wanita, Perdamaian dan Keamanan)**, UN-INSTRAW: Santo Domingo, 2006.

Artikel dan laporan online

Bearne, S. et al, National Security Decision-Making Structures and Security Sector Reform (Struktur Pembuatan Keputusan Keamanan Nasional dan Reformasi sektor keamanan), The RAND Corporation, 2005.

[http://www.rand.org/pubs/technical_reports/TR289/DCAF_Backgrounder_\(Informasi_Latar_Belakang_DCAF\):_National_Security_Policy_\(Kebijakan_Keamanan_Nasional\),_2005.](http://www.rand.org/pubs/technical_reports/TR289/DCAF_Backgrounder_(Informasi_Latar_Belakang_DCAF):_National_Security_Policy_(Kebijakan_Keamanan_Nasional),_2005.)

<http://www.dcaf.ch/publications/kms/details.cfm?Ing=en&id=18417&nav1=4>

Bearne, S. et al, National Security Decision-Making Structures and Security Sector Reform (Struktur Pembuatan Keputusan Keamanan Nasional dan Reformasi sektor keamanan), DfID (Departemen Pembangunan Internasional Inggris), 2005.
<http://www.dfid.gov.uk/Pubs/files/security-decision-making.pdf>

CATATAN AKHIR

- 1 Demi kemudahan rujukan pada tool (alat) ini, istilah 'security policies' ('kebijakan keamanan') merujuk pada kebijakan keamanan tingkat nasional.
- 2 IPU dan DCAF, Parliamentary Oversight of the Security Sector: Principles, Mechanisms and Practices (Pengawasan Parlemen atas Sektor Keamanan: Prinsip, Mekanisme dan Praktik), (IPU dan DCAF: Jenewa), 2003, h. 27.
- 3 Disadur dari Luethold, A., 'Developing a National Security Policy' ('Menyusun Kebijakan Keamanan Nasional'), Workshop on the Role of the Parliament in the Development of a National Security Policy in the Arab Region (Lokakarya mengenai Peran Parlemen dalam Penyusunan Kebijakan Keamanan Nasional di Kawasan Arab) (Presentasi, Montreux) 2007.
<http://www.arabparliaments.org/publications/legislature/2007/montreux/leutholde.pdf>.
- 4 DCAF Backgrounder (Dokumen Latar Belakang DCAF), 'Security Sector Governance and Reform' ('Tata Pemerintahan dan Reformasi sektor keamanan') (DCAF: Jenewa), November 2005, h. 1.
- 5 Fluri, P.H. dan Johnsson, A.B., 'Parliamentary Oversight of the Security Sector' (Pengawasan Parlemen atas Sektor Keamanan), Jenewa, 2003, h. 26.
- 6 Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan), OECD DAC Handbook on Security System Reform (Buku Pedoman OECD DAC tentang Pembinaan Sistem Keamanan) – Supporting Security and Justice (Mendukung Keamanan dan Keadilan), Paris, 2007, h. 92.
- 7 The US National Security Strategy (Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat).
<http://www.whitehouse.gov/nsc/nss/2006/>.
- 8 Shalamanov, V., 'Practices of Security Sector Reform in Europe – the Case of Bulgaria' ('Praktik Reformasi sektor keamanan di Eropa – Kasus Bulgaria'), The Challenges of Security Sector Reform in Macedonia (Tantangan Reformasi sektor keamanan di Makedonia, 6-7 Desember 2002).
- 9 Lithuania's National Security Strategy (Strategi Keamanan Nasional Lituania).
<http://merln.ndu.edu/whitepapers/LithuaniaNationalSecurity-2002.doc>
- 10 Disadur dari Luethold, A., 'Developing a National Security Policy' ('Menyusun Kebijakan Keamanan Nasional'), Workshop on the Role of the Parliament in the Development of a National Security Policy in the Arab Region (Lokakarya mengenai Peran Parlemen dalam Penyusunan Kebijakan Keamanan Nasional di Kawasan Arab) (Presentasi, Montreux) 2007.
<http://www.arabparliaments.org/publications/legislature/2007/montreux/leutholde.pdf>.
- 11 Lithuania's Defence White Paper (Buku Putih Pertahanan Lituania).. <http://merln.ndu.edu/whitepapers/Lithuania-2006.pdf>
- 12 Bosnia-Herzegovina's Defence White Paper (Buku Putih Pertahanan Bosnia-Herzegovina).
http://merln.ndu.edu/whitepapers/Bosnia_English-2005.pdf
- 13 UN Economic and Social Council (Dewan Ekonomi dan Sosial PBB). Report of the Secretary-General (Laporan Sekretaris Jenderal), Coordination of the Policies and Activities of the Specialized Agencies and Other Bodies of the United Nations System: mainstreaming the

- gender perspective into all policies and programmes in the United Nations system (Koordinasi Kebijakan dan Kegiatan Badan-badan Khusus dan Badan-badan dalam Sistem PBB lainnya: pengarusutamaan perspektif gender ke dalam semua kebijakan dan program dalam sistem PBB), 12 Juni 1997.
- 14 'Priorities for Liberia's Reconstruction Process' ('Prioritas Proses Pembangunan Kembali Liberia), Woodrow Wilson International Center for Scholars (Pusat Ilmuwan Internasional Woodrow Wilson), 14 Februari 2007. http://www.wilsoncenter.org/index.cfm?topic_id=1411&useaction=topics.event_summary&event_id=224140
- 15 Danish International Development Agency (Badan Pembangunan Internasional Denmark), 'Sikkerhed, vækst – udvikling' ('Keamanan, perkembangan dan pembangunan') (DANIDA: Kopenhagen), Agustus 2004, h. 17.h
- 16 Anderlini, S.N. dan Conaway, C.P., *Negotiating the Transition to Democracy and Reforming the Security Sector: The Vital contributions of South African Women* (Merundingkan Transisi menuju Demokrasi dan Reformasi Sektor Keamanan: Sumbangan penting Wanita Afrika Selatan), (Women Waging Peace (Wanita Pejuang Perdamaian): Washington DC), Aug. 2004.
- 17 Anderlini dan Conaway. vi.
- 18 UNIFEM, *Not a Minute More: Ending Violence Against Women* (Jangan Menunggu Lagi: Mengakhiri Kekerasan terhadap Wanita) (UNIFEM: New York), 2003, h. 6.
- 19 Centers for Disease Control and Prevention (Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit), 'Intimate Partner Violence: Overview' (Kekerasan Pasangan Intim: Gambaran Umum). <http://www.cdc.gov/ncipc/factsheets/ipvfacts.htm>
- 20 National Security Strategy for Jamaica – Towards a Secure and Prosperous Nation (Strategi Keamanan Nasional Jamaika – Menuju Negara yang Aman dan Makmur). http://www.jdfmil.org/NSS_SDR/NSS_DOC.pdf
- 21 'Domestic Violence – A National Report' ('Kekerasan dalam Rumah Tangga – Sebuah Laporan Nasional'), Maret 2005. <http://www.crimereduction.gov.uk/domesticviolence/domesticviolence51.pdf>
- 22 Barnes, K., Albrecht, P. dan Olson, M., 'Addressing Gender-Based Violence in Sierra Leone: Mapping Challenges, Responses and Future Entry Points' ('Menangani Kekerasan Berbasis Gender di Sierra Leone: Pemetaan Tantangan, Respons dan Titik Mula Masa Depan'), (International Alert [Kewaspadaan Internasional]: London), 2006.
- 23 Struckman-Johnson, C. & Struckman-Johnson, D., 'Sexual Coercion Rates in Seven Midwestern Prisons for Men' ('Tingkatan Paksaan Seksual di Tujuh Lembaga Masyarakat Pria di Kawasan Barat Tengah'), *The Prison Journal* (Jurnal Lembaga Masyarakat) 379 (2000). <http://www.spr.org/pdf/struckman.pdf>
- 24 Carpenter, R.C., 'Recognizing Gender-Based Violence Against Civilian Men and Boys in Conflict Situations' ('Mengenali Kekerasan Berbasis Gender terhadap Pria dan Anak Lelaki Sipil dalam Situasi Konflik'), *Security Dialogue* (Dialog Keamanan). Jilid 37(1) (2006), h. 87.
- 25 *Securing an Open Society: Canada's National Security Policy* (Menciptakan Masyarakat yang Terbuka: Kebijakan Keamanan Nasional Kanada), April 2004. http://www.pco-bcp.gc.ca/docs/InformationResources/Publications/NatSecurnat/natsecurnat_e.pdf.
- 26 National Committee for the Advancement of Women in Viet Nam (Komite Nasional Kemajuan Wanita di Viet Nam), 'Gender in Public Policy' ('Gender dalam Kebijakan Publik'), *Gender Mainstreaming Guidelines in the National Policy Formulation and Implementation* (Panduan Pengarusutamaan Gender dalam Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Nasional). *Towards Gender Equality in Viet Nam through Gender-Responsive National Policy and Planning* (Menuju Kesetaraan Gender di Viet Nam melalui Kebijakan dan Perencanaan Nasional yang Tanggap terhadap Gender), Hanoi, 2004, VIE 01-015-01 Project, h.28.
- 27 Bearne, S. penyunting, 'National Security Decision-Making Structures and Security Sector Reform' ('Struktur Pembuatan Keputusan Keamanan Nasional dan Reformasi sektor keamanan'), Inggris, Juni 2005. <http://www2.dfid.gov.uk/pubs/files/securitydecision-making.pdf>.
- 28 Implikasi operasional dari manajemen krisis tidak diuraikan dengan jelas, tapi konsep tersebut diperkenalkan sebagai pengganti rancangan undang-undang NSC, yang mengemukakan 'hal-hal yang berkaitan dengan demokrasi, tata pemerintahan dan keselarasan antar-provinsi'.
- 29 Inter-Parliamentary Union (Persatuan Antar-Parlemen), 'Women in Politics' ('Wanita dalam Politik): 2005'. http://www.ipu.org/pdf/publications/wmmmap05_en.pdf.
- 30 Nathan, L., *Local Ownership of Security Sector Reform: A Guide for Donors* (Pemilikan Lokal Reformasi sektor keamanan: Panduan bagi Lembaga Donor), London, Januari 2007, h. 31.
- 31 Sierra Leone's White Paper on Defence (Buku Putih Pertahanan Sierra Leone), paragraf 1018.
- 32 Ukraine's National Security Strategy (Strategi Keamanan Nasional Ukraina), paragraf 3.10; Romania's National Security Strategy (Strategi Keamanan Nasional Rumania), paragraf 3.2. <http://merln.ndu.edu/whitepapers/RomaniaNationalSecurity.pdf>.
- 33 Romania's National Security Strategy (Strategi Keamanan Nasional Rumania), paragraf 5.3.
- 34 Ireland's White Paper on Defence (Buku Putih Pertahanan Irlandia). <http://www.statehousesl.org/policies/defence-white-paper.html>; Sierra Leone's White Paper on Defence. <http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.pdf>; National Security Strategy of Ukraine (Strategi Keamanan Nasional Ukraina) (unofficial translation) (terjemahan tak resmi). <http://www.mfa.gov.ua/usa/en/publication/content/8387.htm>; National Security Concept of Georgia (Konsep Keamanan Nasional Georgia). http://www.mfa.gov.ge/?sec_id=23&lang_id=ENG; National Security Strategy for Jamaica (Strategi Keamanan Nasional Jamaika) – Towards a Secure and Prosperous Nation (Menuju Negara yang Aman dan Makmur). http://www.jdfmil.org/NSS_SDR/NSS_DOC.pdf.
- 35 South Africa's White Paper on Intelligence (Buku Putih Intelijen Afrika Selatan), Afrika Selatan 1995, paragraf 5.6. <http://www.info.gov.za/whitepapers/1995/intelligence.htm>.
- 36 South Africa's White Paper on National Defence for the Republic of South Africa (Buku Putih Afrika Selatan

- tentang Pertahanan Nasional Republik Afrika Selatan) – Defence in a Democracy (Pertahanan di Negara Demokrasi), Bab 6, Paragraf 36-37 (Afrika Selatan 1996).
<http://www.info.gov.za/whitepapers/1995/defence.htm>.
- ³⁷ South Africa's White Paper on Safety and Security (Buku Putih Keselamatan dan Keamanan Afrika Selatan) (Afrika Selatan 1998).
<http://www.info.gov.za/whitepapers/1998/safety.htm>.
- ³⁸ 'Security Sector Reform - Potentials and Challenges for Conflict Transformation' ('Reformasi sektor keamanan – Potensi dan Tantangan dalam Transformasi Konflik), Berghof Handbook Dialogue Series (Seri Dialog Buku Pedoman Berghof), No. 2, h. 58.
http://www.berghofhandbook.net/uploads/download/dialogue2_ssr_complete.pdf.
- ³⁹ Fluri dan Johnsson.
- ⁴⁰ Nathan, h.38.
- ⁴¹ Inter-Parliamentary Union (Persatuan Antar-Parlemen), Women in National Parliaments (Wanita di Parlemen Nasional), IPU, 31 Oktober 2006.
- ⁴² Anderlini dan Conaway.
- ⁴³ 'Ready to Govern – ANC Policy Guidelines for a Democratic South Africa' adopted at the National Conference ('Siap Memerintah – Panduan Kebijakan ANC untuk Afrika Selatan yang Demokratis', disetujui Konferensi Nasional), 28-31 Mei 1992.
<http://www.anc.org.za/ancdocs/history/readyto.html>
- ⁴⁴ Department of Community Safety Provincial Administration Western Cape (Departemen Keselamatan Masyarakat Pemerintah Provinsi Western Cape), Community Police Forum Toolkit (Toolkit [Paket] Forum Kepolisian Masyarakat), 2003.
http://www.capecapegateway.gov.za/Text/2003/12/community_police_forum_toolkit_pp41to80.pdf
- ⁴⁵ Open Society (Masyarakat Terbuka), Justice Initiative (Prakarsa Keadilan).
http://www.justiceinitiative.org/activities/ncjr/police/per_u_cdsc.
- ⁴⁶ Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan), h. 55.
- ⁴⁷ DfID (Departemen Pembangunan Internasional Inggris), h.30.
- ⁴⁸ Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan), h.119.
- ⁴⁹ <http://www.peacewomen.org/un/ngo/back.html>.
- ⁵⁰ National Security Policy for Jamaica – Towards a Secure and Prosperous Nation (Kebijakan Keamanan Nasional Jamaika – Menuju Negara yang Aman dan Makmur).
http://www.cabinet.gov.jm/docs/pdf/NSS_DOCS/nspannet.pdf; National Security Strategy for Jamaica – Towards a Secure and Prosperous Nation (Strategi Keamanan Nasional Jamaika – Menuju Negara yang Aman dan Makmur), A Green Paper (Buku Hijau). Direvisi Mei 2006; dan Stone, C. ed al, Supporting Security, Justice, and Development: Lessons for a New Era (Mendukung Keamanan, Keadilan, dan Pembangunan: Pelajaran untuk Era Baru), Juni 2005.
- ⁵¹ Born, H., Fluri, P.H dan Johnsson, A.B. Handbook on Parliamentary Oversight of the Security Sector (Buku Pedoman tentang Pengawasan Parlemen atas Sektor Keamanan), (DCAF: Jenewa), 2003.
- ⁵² Valasek, K., 'Gender and Democratic Security Governance' ('Gender dan Tata Pemerintahan Keamanan yang Demokratis'), Public Oversight of the Security Sector: A Handbook for CSOs on Democratic Security Governance (Pengawasan Masyarakat atas Sektor Keamanan: Buku Pedoman bagi OMS mengenai Tata Pemerintahan Keamanan yang Demokratis), Caparini, M., Cole, E. dan Kinzelbach, K. penyunting. (Renesans: Bratislava untuk UNDP & DCAF), akan terbit Juli 2008.
- ⁵³ Disadur dari Valasek, K. bersama Nelson, K., Securing Equality, Engendering Peace: A Guide to Policy and Planning on Women, Peace and Security (UN 1325) (Mencapai Kesetaraan, Mewujudkan Perdamaian: Panduan Kebijakan dan Perencanaan mengenai Wanita, Perdamaian dan Keamanan [PBB 1325]) (INSTRAW: Santo Domingo), 2006, h.24.
- ⁵⁴ Disadur dari: Gender, Women and DDR: Gender-responsive Monitoring and Evaluation Indicators (Gender, Wanita dan DDR: Indikator Pemantauan dan Evaluasi yang Tanggap terhadap Gender).
http://www.unndr.org/tool_docs/Genderresponsive%20Monitoring%20and%20Evaluation%20Indicators.pdf.
- ⁵⁵ Disadur dari Bryden, A. dan Hänggi, H., 'Reforming and Reconstructing the Security Sector' ('Pembenahan dan Pembangunan Kembali Sektor Keamanan'), (Jenewa: DCAF) 2005, h.30.
http://www.dcaf.ch/_docs/Yearbook2005/bm_sgpc_ch02.pdf
- ⁵⁶ DAC CPDC, Enhancing the Delivery of Justice and Security in Fragile States (Meningkatkan Penyediaan Keadilan dan Keamanan di Negara-negara yang Rapuh), Juli 2006, h. 42.

